



SURAT TUGAS

Nomor: 15/LPPM.UMSB/ST/02/2023

Berdasarkan kontrak kerjasama World Resources Institute (WRI) Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (LPPM UM Sumatera Barat) nomor: 42/UMSB/Riset Pengembangan Masy PS/50078/XII/2022 tentang Perjanjian Layanan Profesional, maka Ketua LPPM UM Sumatera Barat dengan ini menugaskan kepada :

No	Nama	NIDN/NIM	Jabatan
1	Dr. Ir. Firman Hidayat, MT	0018026106	Team Leader
2	Dr. Muhamad Reza, S.Pt., M.Si	1009058401	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi
3	Rizqha Sepriyanti Burano, ST., M.Si	1013098601	Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah
4	Afdoli Sinaloan	191000254251004	Enumerator
5	Mey Susianti	191000254251028	Enumerator
6	Aldi Putra Riwanto	191000254251008	Enumerator
7	Zeli Gusmarni	21090010	Enumerator
8	Dea Devanza	21090006	Enumerator
9	Syafa'atinnisa	21090030	Enumerator

Untuk melaksanakan tugas kegiatan penelitian dengan dengan judul “Memetakan Persepsi dan Potensi Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan, Serta Kemungkinan Adanya Tantangan-tantangan Kelembagaan/*Institutional Bottlenecks* dalam Upaya Pengembangan Mata Pencaharian Berkelanjutan Berbasis Izin Perhutanan Sosial Bagi Masyarakat Adat dan Lokal di Sumatera Barat” yang akan dilaksanakan pada:

Waktu kegiatan : 17 Februari - 31 Maret 2023

Lokasi : Sumatera Barat

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggungjawab.

Padang, 17 Februari 2023

26 Rajab 1444 H

Ketua LPPM UM. Sumatera Barat

Rizqha Sepriyanti Burano, S.T., M.Si
NBM.1207079

Tembusan:

1. Arsip
2. Pritinggal

PERMINTAAN PROPOSAL/ REQUEST FOR PROPOSALS (RFP):

Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Provinsi Sumatera Barat

RINGKASAN PEMBELIAN/ SUMMARY OF PROCUREMENT

WRI Indonesia bermaksud untuk memberikan kontrak Harga Tetap senilai Rp 50,000,000, - net untuk pekerjaan Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Provinsi Sumatera Barat. Vendor terpilih akan mengumpulkan hasil capaian (*deliverables*) untuk disetujui oleh WRI Indonesia. Kontrak akan ditandatangani dan dibayar oleh WRI Indonesia, mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia.

Tentang WRI Indonesia/ About WRI Indonesia

WRI Indonesia adalah organisasi penelitian independen yang berdedikasi untuk berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami difokuskan pada enam bidang utama: hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, tata kelola, serta laut. Kami mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar menjadi aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Didirikan pada Januari 2014 dengan kantor pusat di Jakarta, WRI Indonesia berafiliasi dengan World Resources Institute, lembaga kajian lingkungan global berbasis di Washington D.C. WRI memiliki jaringan penelitian yang beranggotakan lebih dari 450 tenaga ahli dan staf di lebih dari 50 negara, dengan kantor di Tiongkok, India, Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, kami telah mengerjakan proyek bersama dengan mitra-mitra kami selama lebih dari 20 tahun, dan WRI Indonesia didirikan untuk membangun keberadaan dalam negeri yang kuat, membuat formal kemitraan yang telah terbentuk, serta memperkuat penelitian lapangan kami.

Tentang Proyek

Proyek Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods (IPLC) bertujuan untuk memperkuat pengakuan terhadap hak kelola bagi kelompok Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLC) di setidaknya 32.000 hektar hutan, di 5 provinsi prioritas, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan penghidupan bagi 1.250 anggota masyarakat melalui model bisnis berkelanjutan serta mengedepankan kesetaraan gender dan pemberdayaan pemuda di wilayah tersebut.

Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah menjadikan agenda perhutanan sosial sebagai salah satu kebijakan prioritas demi meningkatkan keamanan penghidupan dan kepemilikan lahan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Akan tetapi, momentum untuk mendukung kelompok Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Indigenous People and Local Community/ IPLC) ini dapat terhambat akibat pandemi COVID-19, yang memaksa pemerintah merelokasi anggarannya. Di saat yang sama, masyarakat marginal juga mengalami kekurangan pemasukan, pemecatan, ketidakpastian pasokan pangan, serta risiko kesehatan. Studi menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi sering kali memaksa masyarakat lokal untuk merambah hutan utuh demi uang dan peternakan. Padahal, perilaku semacam ini dapat meningkatkan deforestasi, yang akan meningkatkan risiko kekurangan air dan pangan,

menimbulkan bencana seperti longsor dan banjir, serta risiko wabah penyakit lain yang disebabkan satwa liar pembawa penyakit yang kehilangan habitatnya.

Dengan latar belakang ini, WRI Indonesia berniat untuk menjaga momentum politik dan meningkatkan dukungan kepada kelompok IPLC dalam mengamankan hutan kemasyarakatan mereka serta mengadopsi mata pencaharian ramah hutan yang dapat mengurangi dan membalikkan deforestasi di 5 provinsi kaya hutan, yaitu Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

LINGKUP PEKERJAAN DAN KELUARAN/CAPAIAN KERJA

Latar Belakang & Tujuan

Upaya pengembangan PS pasca izin membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pemangku kepentingan, antara lain: KPH dan instansi kehutanan; OPD terkait; pemerintah desa/nagari; pemerintah provinsi dan nasional; BUMN / BUMD / BUMS; lembaga keuangan; pelaku pasar / offtaker; LSM pendamping masyarakat; kelembagaan adat dilevel nagari serta peran aktif masyarakat setempat. Adanya wadah Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di Sumatera Barat idealnya juga menjadi ruang untuk mendukung keselarasan persepsi dan proses yang kolaboratif antar pemangku kepentingan yang terkait.

Menindaklanjuti pentingnya upaya sinergis di atas, riset ini bertujuan untuk memetakan persepsi dan potensi kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta kemungkinan adanya tantangan-tantangan kelembagaan / institutional bottlenecks – khususnya, dalam kaitannya dengan upaya pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis izin PS bagi masyarakat adat dan lokal di Sumatera Barat.

Tujuan riset tersebut selaras dengan tujuan umum kegiatan riset baseline program IPLC, yaitu antara lain:

1. memetakan persepsi stakeholder terkait pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan isu-isu terkait;
2. melakukan studi *social network analysis* terkait hubungan antar pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
3. rekomendasi terkait potensi konflik dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat tapak (nagari).

Kerangka & Pertanyaan Penelitian

Potensi kolaborasi dan tantangan kelembagaan dapat ditinjau secara formal dengan memetakan 3 hal mendasar yang melekat pada setiap pemangku kepentingan (Enserink et al., 2010):

- **Tujuan / kepentingan** stakeholder bersangkutan dalam kaitannya dengan suatu isu (objectives)
- **Sumber daya** yang dimiliki untuk memenuhi tujuan / kepentingan pemangku kepentingan bersangkutan dalam kaitannya dengan suatu isu (resources)
- **Persepsi** pemangku kepentingan terkait mengenai suatu isu (perceptions)

Sesuai dengan tujuan studi di atas, pemetaan tujuan, sumber daya dan persepsi akan difokuskan pada isu proses / mendukung pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis Perhutanan Sosial. Studi diharapkan dapat memberi insight untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

- Menurut pemangku kepentingan di Sumatera Barat, apa saja masalah utama dalam mendukung pengembangan mata pencaharian berkelanjutan di Perhutanan Sosial Sumatera Barat?
 - Apakah pemahaman masalah dari para pemangku kepentingan tersebut selaras, atau ada yang justru bertolak belakang?
 - Apa peran dan fungsi kelembagaan adat di level nagari didalam menseleraskan kepentingan para pemangku kepentingan?
 - Apa modal sosial yang sudah ada didalam pengembangan sumber penghidupan masyarakat nagari melalui skema perhutanan sosial?
- Bagaimana kondisi eksisting serta potensi kolaborasi antar stakeholder dalam mengatasi kendala sumber daya yang ada untuk mendukung pengembangan mata pencaharian berkelanjutan PS?
- Apa saja aspek terkait pengembangan ekonomi berbasis PS yang penting namun belum menjadi prioritas pemangku kepentingan terkait?

Pendekatan & Metode Penelitian

Penelitian, baik itu pengumpulan maupun analisis data, akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Data primer mengenai objectives, resources, dan perceptions dapat diambil melalui proses wawancara pemangku kepentingan / stakeholder interview, survei, dan/atau *focus group discussion* – disesuaikan dengan kebutuhan, dana, dan kondisi lapangan. Studi literatur (e.g., paper jurnal, dokumen kebijakan, online resources, buku, dsb) dapat dilakukan untuk mendukung temuan dan analisis serta mengisi gap data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian.

Sebagai acuan awal, mitra dapat mengacu pada pertanyaan berikut dalam proses penggalian data:

- Perceptions
 - Menurut narasumber / stakeholder terkait, apa problem utama dalam mendukung pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis Perhutanan Sosial di Sumatera Barat?
- Objectives
 - Apa program dan rencana kerja stakeholder terkait yang spesifik untuk mendukung pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis Perhutanan Sosial di Sumatera Barat?
 - Bagaimana kaitan antara program / rencana kerja tsb dengan visi / misi stakeholder bersangkutan secara umum dalam konteks perhutanan sosial?
- Resources
 - Apa kendala stakeholder terkait dari sisi sumber daya di dalam menjalankan rencana kerja, program, maupun visi-misi terkait pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis Perhutanan Sosial di Sumatera Barat?
 - Sejauh apa kolaborasi telah atau sedang dilakukan oleh stakeholder bersangkutan dengan stakeholder lainnya dalam menjalankan rencana kerja / program terkait pengembangan mata pencaharian berkelanjutan PS di Sumbar?
 - Bagaimana kondisi pasar dan rantai pasok komoditas hasil hutan mempengaruhi prioritas para stakeholder untuk pengembangan mata pencaharian berbasis PS?

Selanjutnya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dapat mengembangkan lebih lanjut terkait guide / list pertanyaan pengumpulan data sesuai kondisi lapangan, keahlian, dan pengetahuan yang

dimiliki. Pemilihan lokasi riset yang ideal akan didiskusikan lebih lanjut dalam proses koordinasi pelaksanaan riset antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan WRI Indonesia. Terkait pemilihan narasumber, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan menentukan daftar narasumber wawancara yang memiliki relevansi dengan tujuan studi ini – disesuaikan dengan kebutuhan studi, sumber daya pendanaan dan waktu pelaksanaan studi. Berdasar diskusi awal, data serta cakupan narasumber dapat mencakup sektor kehutanan dan juga non-kehutanan yang relevan dengan konteks PS.

Keluaran / Deliverables Yang Diharapkan

- 1. Deliverable 1: guide pengumpulan data yang berisi:**
 - Daftar literatur yang dikaji dalam kaitannya dengan riset ini
 - daftar narasumber yang diwawancarai;
 - daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara
- 2. Deliverable 2: laporan hipotesa awal/preliminary analysis terkait gambaran pemangku kepentingan yang ada dan pengaruhnya terhadap implementasi/pengelolaan perhutanan sosial Sumatra Barat**
- 3. Deliverable 3: transkrip wawancara (non-verbatim / verbatim)**
- 4. Deliverable 4: link Google Drive berisi dokumen yang digunakan untuk review literatur.**
- 5. Deliverable 5: laporan riset, yang berisi:**
 - a. Elaborasi terkait pemetaan resources, objectives, perceptions dari stakeholders yang relevan di Sumatera Barat mengenai pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis Perhutanan Sosial; baik dari sektor kehutanan maupun non-kehutanan yang relevan.
 - b. Analisis data dan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dijabarkan sebelumnya di atas
 - c. Laporan Deliverable 5 ini dapat menyambung hipotesa awal / preliminary analysis yang sudah disampaikan dalam Deliverable 2
 - d. Laporan berisi substansi hasil analisis dan rekomendasi maksimal berjumlah 25 halaman. Detil mengenai data dan keterangan lainnya dapat dimuat dalam halaman Lampiran yang tidak terpisah dari laporan tersebut.

WAKTU

Estimasi lini waktu / timeline pelaksanaan riset secara umum sebagai berikut.

AKTIVITAS	ESTIMASI WAKTU PELAKSANAAN
Finalisasi dan penandatanganan kontrak	30 November 2022
Pengumpulan Deliverable 1 dan 2 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ke WRI	6 Januari 2023
Pengumpulan Deliverable 3, 4, 5 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ke WRI	28 Februari 2023

Untuk mendukung koordinasi pelaksanaan riset khususnya selama periode kontrak, akan dilakukan online meeting secara berkala antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan WRI Indonesia. Periode waktu meeting akan disepakati kemudian.

ANGGARAN/ BUDGET

Estimasi budget yang akan tersedia sebesar **Rp 50,000,000 -net**. Budget tersebut akan diberikan secara penuh / lump sum dan akan dicantumkan di dalam kontrak.

Pembayaran akan diberikan sesuai dengan termin sebagai berikut, setelah capaian kerja / deliverables disetujui oleh tim WRI Indonesia

No.	Pembayaran	Termin	% dari total budget
1.	Uang muka / Down Payment	Setelah kontrak ditandatangani	20%
2.	Term 1	Setelah capaian 1, 2 diserahkan dan disetujui WRI Indonesia	30%
3.	Term 2	Capaian 3, 4, 5 diserahkan dan disetujui WRI Indonesia	50%

PANDUAN PENYERAHAN PROPOSAL

Persyaratan

Vendor terpilih akan dapat menunjukkan kapasitas dalam pekerjaan serupa, khususnya:

- Keahlian yang kuat dalam topik Perhutanan Sosial dan aksesibilitas pemangku kepentingan tingkat provinsi/kabupaten yang relevan dan masyarakat lokal, khususnya dalam konteks provinsi Sumatera Barat
- Keahlian dalam topik analisis kelembagaan dan pemetaan pemangku kepentingan.
- Pengalaman dalam melakukan metode kualitatif dalam penelitian. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kuesioner/survei, FGD, wawancara, dan sintesis literatur.
- Rekam jejak yang terbukti dalam menerbitkan topik serupa di jurnal nasional dan/atau internasional

Isi Proposal

Calon Vendor harus menyerahkan:

- Profil Perusahaan (termasuk upaya keberlanjutan)
- Pernyataan minat yang menjelaskan tentang tim yang diusulkan dan bagaimana tim tersebut dapat memenuhi persyaratan di atas
- CV anggota tim;
- Contoh dan referensi pekerjaan yang serupa sebelumnya;
- Garis besar metodologi dan rencana kerja yang diusulkan;
Pernyataan kepatuhan hukum perusahaan, silakan unduh pernyataan [disini](#)

Pernyataan Minat

Pernyataan minat dan pertanyaan tentang RFP ini harus dikirim melalui email ke kontak di bawah ini paling lambat tanggal 24 November 2022 pukul 17:00.

Rizky.Haryanto@wri.org, Dean.Affandi@wri.org – cc: Procurement-Indonesia@wri.org

Proposal harus dikirim paling lambat **Kamis, tanggal 24 November 2022 pukul 17:00** dalam format elektronik ke kontak yang sama yang tercantum di atas.

EVALUSI DAN SELEKSI/ EVALUATION AND SELECTION

Kriteria Evaluasi/ *Evaluation Criteria*

Elemen-elemen berikut akan menjadi pertimbangan utama dalam penilaian proposal yang diserahkan untuk RfP ini:

- Kelengkapan seluruh elemen yang dipersyaratkan (kualitas proposal) ;
- Sejauh mana proposal yang diserahkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan WRI Indonesia dan menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang dimaksud;
- Pengalaman dengan proyek/pekerjaan sejenis (portfolio proyek);
- Keseluruhan biaya dalam proposal yang diajukan (nilai uang) ;
- Keberlanjutan – WRI Indonesia menghargai keberlanjutan dan faktor-faktor lain yang dianggap setara, akan mendukung proposal yang melaksanakan pekerjaan secara berkelanjutan;

Proses Seleksi / *Selection Process*

Biaya-biaya yang timbul dalam pengembangan proposal tidak dapat ditagihkan ke WRI Indonesia dan seluruh biaya ditanggung oleh calon Vendor. WRI Indonesia dapat memilih calon vendor dengan nilai terbaik tanpa diskusi. Namun demikian, WRI Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan klarifikasi dan bernegosiasi dengan para calon vendor yang menawarkan harga yang kompetitif.

WRI Indonesia dapat, atas keinginannya sendiri dan tanpa penjelasan kepada calon vendor, untuk menghentikan kegiatan pengadaan ini tanpa kewajiban apapun terhadap para calon vendor.

PROPOSAL

Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Sumatera Barat



**Oleh:
Tim LPPM UM Sumatera Barat**

**NOVEMBER, 2022
PADANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran untuk tim dalam merampungkan proposal ini. Salawat beserta salam kami sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SWA yang telah membawa umat manusia kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Proposal ini merupakan interpertasi tim terhadap KAK yang dirumuskan oleh WRI Indonesia tentang kegiatan Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Sumatera Barat. Cakupan yang terdapat dalam proposal terdiri dari BAB I. Pendahuluan, BAB II. Tinjauan Kepustakaan, BAB III. Metode Kajian. Keseluruhan cakupan yang terdapat pada proposal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Proposal ini nantinya menjadi acuan oleh Tim dalam melaksanakan kegiatan kajian.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwasannya proposal ini membutuhkan masukan yang membangun. Demikian yang dapat kami ungkapkan, atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, kami ucapkan terimakasih.

Padang,.....November 2022

Tim Kajian LPPM UM Sumatera Barat

dto

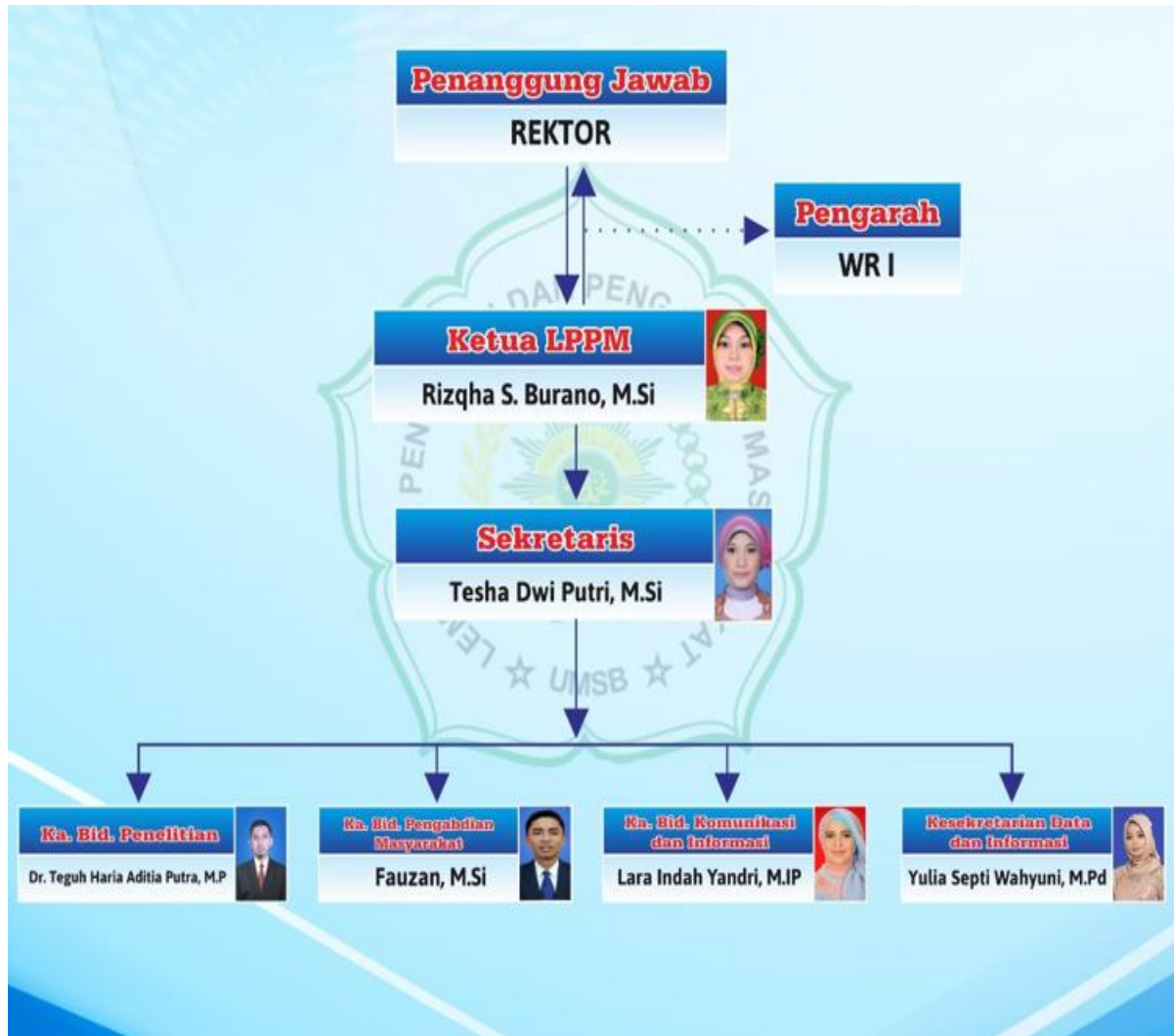
Dr. Firman Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I. Profil LPPM UM Sumatera Barat	3
BAB II. CV. Anggota Tim	7
BAB III. Contoh dan Referensi Pekerjaan yang Serupa Sebelumnya	25
BAB IV. Garis Besar Metodologi dan Rencana Kerja	28

BAB I.
PROFIL LPPM UM SUMATERA BARAT

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LPPM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**



PENDAHULUAN

Aktivitas penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat merupakan pengimplementasian Catur Darma Perguruan Tinggi yang menjadi pilar perguruan tinggi ini. Untuk mewujudkan kegiatan penelitian yang dapat menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membantu tercapainya tujuan pengembangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dibutuhkan profil yang menjadi gambaran bagaimana struktur, kinerja, dan program-program yang diwadahi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian di UM Sumatera Barat.

Disamping itu, LPPM UM Sumatera Barat memfasilitasi segala bentuk kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik antar bidang ilmu maupun antar lembaga lembaga ini juga merupakan wadah bagi pembentukan berbagai pusat studi dan pusat kegiatan di lingkungan UM Sumatera Barat. Kemudian, LPPM UM Sumatera Barat juga memfasilitasi berbagai pelatihan, workshop, dan pembekalan keilmuan dan praktik pengabdian.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya profil UM Sumatera Barat dapat membantu tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Visi UM Sumatera Barat yang disusun merupakan pandangan ke depan, berdasarkan kondisi perubahan dan dinamika pada setiap program studi yang harus menghasilkan lulusan untuk memenuhi tuntutan lokal, nasional, dan mampu bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di UM Sumatera Barat, selain harus mampu memberikan pelayanan keilmuan dan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, juga harus mampu memberikan daya guna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki moralitas akademik.

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang Unggul berbasis kearifan lokal dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berguna Untuk Pembangunan Negara dan Kepentingan Umat

Misi

1. Menjadikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sebagai sentral riset yang unggul berbasis kearifan lokal untuk menghasilkan produk IPTEK dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Menjadikan lembaga yang memproduksi berbagai karya penelitian inovatif, bermanfaat dan memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan di tingkat lokal serta nasional.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian secara akademis, professional dan berbudaya keislaman.
4. Membangun sinergi aktivitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan Amal Usaha Muhammadiyah, institusi pemerintah, BUMN, swasta dan perguruan tinggi lainnya yang berada di tingkat lokal maupun nasional.

SEJARAH KEPEMIMPINAN

LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, pertama kali di bentuk pada tahun 1995. Personil-personil yang pernah menjabat sebagai ketua LPPM UM Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Riwayat Pimpinan LPPM UM Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	Dr. Mafardi, MP	Ketua	1996-2006
2.	Ir. Hariadi, M.Eng	Ketua	2006-2010
3.	Dr. Zuherna Miswar, MT	Ketua	2010-2014
4.	Dr. Muhamad Reza, S.Pt., M.Si	Ketua	2014-2015
5.	Dr. Wedy Nasrul, SE., M.Si	Ketua	2015-2018
6.	Dr. Muhamad Reza, S.Pt., M.Si	Ketua	2018-2019
7.	Dr. Muhamad Reza, S.Pt., M.Si	Ketua	2020-2022
8.	Rizqha Sepriyanti Burano, ST., M.Si	Ketua	2022-2025

Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor: 0410/KEP/II.3.AU/D/2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA BARAT

Alamat : Jln. Pasirkandang No. 4 Koto Tangah Telp. (0751) 4851002, Fax: 482274, Padang (25172)
Website : www.umsb.ac.id Email: info@umsb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
Nomor : 0410 /KEP/II.3.AU/D/2022

Tentang
PENGURUS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
PERIODE 2022-2025

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat setelah:

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah agar lebih efektif dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2022-2025.
b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. AD dan ART Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 5 April 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Periode 2022-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2022-2025.
Kedua : Membuat laporan kinerja tahunan dan melaporkan kepada Rektor Cq Wakil Rektor I setiap tahunnya.
Ketiga : Sewaktu-waktu Rektor mempunyai hak penuh untuk memberhentikan apabila yang bersangkutan tidak menjalankan amanah.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 10 April 2025.
Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing personil untuk dilaksanakan sebagai amanah, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Padang
Tanggal : 7 Ramadhan 1443 H
8 April 2022 M

Rektor,

Dr. Riki Saputra, MA
NBM.1198.585

Tembusan :

1. BPH UM Sumatera Barat
2. Dekan di Lingkungan UM Sumatera Barat
3. Beresbasa UM Sumatera Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Nomor : 0410/KEP/II.3.AU/D/2022

Tanggal : 7 Ramadhan 1443 H
8 April 2022 M

Tentang

**PENGURUS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
PERIODE 2022-2025**

Penanggungjawab : Rektor
Pengarah : Wakil Rektor I

Ketua : Rizqha Sepriyanti Burano, ST., M. Si
Sekretaris : Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si

Ketua Bidang Penelitian : Dr. Teguh Haria Aditia Putra, M.P
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat : Fauzan, M.Si
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi: Lara Indah Yandri, S.IP, M.IP
Kesekretariatan, Data dan Informasi : Yulia Septi Wahyuni, M.Pd

:


Rektor,

Dr. Riki Saputra, MA
NBM. 1198 585

TUGAS POKOK DAN PENGURUS LPPM UM SUMATERA BARAT

I. KETUA

Ketua LPPM UM Sumatera Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh kepada Rektor dan Wakil Rektor 1 UM Sumatera Barat mengenai pengelolaan LPPM UM Sumatera Barat;
2. Menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UM Sumatera Barat;
3. Menyusun Rencana Strategis LPPM UM Sumatera Barat;
4. Menyusun Rencana kerja tahunan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengkoordinasikan kebijakan LPPM UM Sumatera Barat kepada *stakeholder* terkait baik di internal maupun eksternal UM Sumatera Barat;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan LPPM dengan pihak-pihak yang terkait;
7. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga terkait;
8. Memastikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mengacu pada tema penelitian unggulan UM Sumatera Barat;
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen baik Internal maupun Eksternal;
10. Meningkatkan Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa Jurnal Nasional, Jurnal Internasional, Prosiding Nasional, Prosiding Internasional, Buku Ajar, Buku Monograf;
11. Melaporkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor dan atau Wakil Rektor 1 UM Sumatera Barat;
12. Melaporkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada laman/web UM Sumatera Barat dan Kinerja Penelitian Ristekdikti.

II. SEKRETARIS

Sekretaris LPPM UM Sumatera Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu mewakili Ketua LPPM bila ketua berhalangan menjalankan

tugasnya;

2. Mengelola aktivitas administrasi di LPPM UM Sumatera Barat;
3. Membantu Ketua dalam menjalankan Program Kerja LPPM;
4. Mengkoordinasikan dan membina SDM LPPM;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang di LPPM;
6. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan LPPM;
7. Menyusun laporan tahunan kegiatan dan keuangan LPPM;
8. Menata dan mengkoordinasikan manajemen teknis administrasi LPPM;
9. Menampung semua surat-surat masuk dan memberi paraf setiap surat keluar yg ditandatangani ketua LPPM;
10. Memimpin rapat-rapat rutin dengan staf LPPM jika ketua berhalangan;
11. Mendampingi Ketua LPPM dalam rapat-rapat rutin;
12. Membagi tugas, memberi petunjuk dan masukan kepada Ketua LPPM.

III. BENDAHARA

Bendahara LPPM UM Sumatera Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola administrasi keuangan operasional LPPM UM Sumatera Barat;
2. Mengelola administrasi keuangan hibah penelitian dan pengabdian yang berasal dari internal UM Sumatera Barat;
3. Mengelola administrasi keuangan hibah penelitian dan pengabdian yang berasal dari eksternal UM Sumatera Barat;
4. Mengelola administrasi keuangan penelitian dan pengabdian yang berasal dari kerjasama antara peneliti/pengabdi/lembaga pusat studi dengan pihak ketiga;
5. Menyusun laporan penggunaan keuangan LPPM UM Sumatera Barat;
6. Menyusun RAB LPPM UM Sumatera Barat;
7. Menjamin kelancaran uang keluar dan masuk ke dalam kas LPPM UM Sumatera Barat.

IV. KESEKRETARIATAN DATA DAN INFORMASI

Kesekretariatan, data, dan informasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu sekretaris LPPM UM Sumatera Barat menjalankan tugas dan fungsi serta program dan kegiatannya;

2. Membantu Ketua Bidang Penelitian, Ketua Bidang Pengabdian pada Masyarakat, Ketua Bidang Sistem Informasi dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah dalam menjalankan tugas dan fungsi, program dan kegiatannya;
3. Mengelola data dan informasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan UM Sumatera Barat berbasis web LPPM UM Sumatera Barat dan web Simlitabmas;
4. Membantu penyelenggaraan aktifitas harian LPPM UM Sumatera Barat.

V. KA. BIDANG PENELITIAN

Ketua Bidang Penelitian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu ketua LPPM UM Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan penelitian di internal UM Sumatera Barat;
2. Menyusun Rencana kerja tahunan kegiatan penelitian;
3. Mengelola penyelenggaraan hibah internal penelitian UM Sumatera Barat;
4. Mengkoordinir pelaksanaan penelitian dosen agar mengacu pada tema penelitian unggulan UM Sumatera Barat;
5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan penelitian dosen;
6. Penyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian baik yang berasal dari pendanaan internal maupun eksternal UM Sumatera Barat;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Penelitian dosen baik internal maupun Eksternal;
8. Meningkatkan Luaran penelitian berupa Jurnal Nasional maupun Internasional, prosiding Nasional maupun Internasional, Buku Ajar, Buku Monograf, HKI;
9. Berkoordinasi dengan pengelola Jurnal di lingkungan UM Sumatera Barat untuk membantu capaian luaran penelitian dosen dan mahasiswa;
10. Melaporkan semua kegiatan penelitian ke laman/web UM Sumatera Barat dan Kinerja Penelitian pada web Simlitabmas.

VI. KA. BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Ketua Bidang Pengabdian Pada Masyarakat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu ketua LPPM UM Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan

- kegiatan pengabdian pada masyarakat di internal UM Sumatera Barat;
2. Menyusun Rencana kerja tahunan kegiatan pengabdian pada masyarakat;
 3. Mengelola penyelenggaraan hibah internal pengabdian pada masyarakat UM Sumatera Barat;
 4. Mengkoordinir pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa agar mengacu pada tema penelitian unggulan UM Sumatera Barat;
 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat;
 6. Menyelenggarakan Seminar Hasil pengabdian pada masyarakat baik yang berasal dari pendanaan internal maupun eksternal UM Sumatera Barat;
 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat dosen baik internal maupun eksternal;
 8. Meningkatkan Luaran pengabdian pada masyarakat berupa Jurnal Nasional maupun Internasional, prosiding Nasional maupun Internasional, Buku Ajar, Buku Monograf, dan HKI;
 9. Berkordinasi dengan pengelola Jurnal di lingkungan UM Sumatera Barat untuk membantu capaian luaran pengabdian pada masyarakat dosen dan mahasiswa;
 10. Melaporkan semua kegiatan pengabdian pada masyarakat ke laman/web UM Sumatera Barat dan Kinerja Penelitian pada web Simlitabmas.

VII. KA. BIDANG SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Ketua Bidang Sistem Informasi dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah memiliki tugas dan fungsi

sebagai berikut:

1. Mengelola sistem informasi LPPM UM Sumatera Barat berbasis web LPPM UM Sumatera Barat dan web Simlitabmas;
2. Membantu pengelolaan IT untuk setiap bidang dalam LPPM UM Sumatera Barat;
3. Mengelola publikasi ilmiah berupa jurnal nasional yang berada dalam LPPM UM Sumatera Barat;

4. Memfasilitasi pengelolaan jurnal yang berada dalam Fakultas di lingkup UM Sumatera Barat;
5. Mengelola publikasi ilmiah dosen UM Sumatera Barat dan luar UM Sumatera Barat dalam bentuk prosiding.

BAB II. CV ANGGOTA TIM

A. CV Ketua Peneliti/ Tim Leader

I. IDENTITAS DIRI

1	Nama	Dr. Ir. Firman Hidayat MT
2	Jabatan Fungsional/Gol	Lektor Kepala/IV a
3	NIP	196102181987021002
4	NIDN	0018026106
5	Tempat dan tanggal lahir	Bukittinggi, 17 Pebruari 1961
6	Alamat rumah	Jalan Medan No 14 Ulak Karang Selatan, Padang, 25135
7	HP	081363461331
8	Alamat Kantor	Fakultas Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jl, Pasir Kandang No 4 Koto Tengah, Padang
9	No Telp/faks	0751-4851002/482274
10	Alamat e mail	firman.hidayat1961@gmail.com
11	Lulusan yang Telah Dihilkan	S1 = 23 orang
12	Mata Kuliah yang diampuh	1. Hutan Kemasyarakatan 2. Perhutanan Sosial 3. Geographycal Information System (GIS) 4. Komunikasi dan Informasi Kehutanan 5. Klimatologi 6 Photogrametri/Penginderaan jauh 7. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program	S1	S2	S3
2.2 Nama PT	Universitas Andalas	ITB	Institut Pertanian Bogor
2.3 Bidang Ilmu	Ilmu Tanah	Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
2.4 Tahun masuk	1981	1995	2009
2.5 Tahun lulus	1986	1998	2014
2.6 Judul Skripsi/ tesis/disertasi	Pengaruh Sisa Pengapuran Terhadap Kedelai (<i>Soya max. L</i>) Pada Tanah Podzolik Merah Kuning Sitiung II	Dampak Usaha Tani Cabe Paprika Terhadap Perekonomian Lokal (Studi kasus)	Optimalisasi Penggunaan lahan Terhadap Pengembangan Sumber Daya Air DAS Mahat Hulu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
2.7 Nama Pembimbing /promotor	Prof. Dr. Ir. Hj. Nurhayati Hakim	Ir. Budi Permadi Iskandar MSP	1.Prof Dr.Ir. Naik Sinukaban MSc 2.Prof.Dr. Ir. Kukuh Murtalaksono MS 3.Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol MSc

III. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
3.1	2013	Pengaruh Perubahan lahan DAS Mahat Hulu Terhadap Karakteristik Hidrologi dan Erosi	CSR PLN	Rp 39 Juta
3.2	2012	Optimalisasi Penggunaan lahan Untuk Pengembangan Sumber Daya Air DAS Mahat Hulu	PT Semen Padang	Rp.15 Juta
3.3	2012	Valuasi Ekonomi Pemanfaatan Sumber Daya Air DAS Mahat Hulu	Kementerrian Kehutanan	Rp. 12 Juta

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Tahun	Judul Pengabdian kepada masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
4.1	1998-2003	Pendamping Petani Pengelola Sutera Alam di Kabupaten Solok	KUK DAS	Rp. 250 Juta
4.2	1998-2003	Pendamping Petani Pengelola Sutera Alam di Kabupaten Tanah Datar	KUK DAS	Rp. 250 juta,-
4.3	1998-2003	Pendamping Petani Pengelola Sutera Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota	KUK DAS	Rp. 250 juta,-

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/No	Nama jurnal
5.1	2014	Optimalisi Penggunaan lahan Untuk Pengembangan SDA DI DAS Mahat Hulu Kabupaten Luma Puluh Kota	Reviewer II	Konservasi Hutan,
5.1	2014	Pengaruh Perubahan Lahan Terhadap karakteristik Hidrologi dan Erosi	Vol.V/Juli/2014	Jurnal Ilmu Tanah , IPB Bogor
5.2	2010	Dinamika Penduduk dan Kebutuhan Air.	Volume 02/Agustus 2010	Jurnal Pendidikan Geografi, FIS UNIMED. . ISSN 2085- 8167Medan
5.3	2008	Pola Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) GAPOKTAN TDU Untuk Pengembangan Irigasi Batanghari	Vol. 3 No.1 Hal 1-76 Bulan Jan-Des 2008	Cresswater, Jurnal Pengelolaan dan Konservasi Sumberdaya Air

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul buku	Jumlah halaman	No ISBN	Penerbit
1	2020	Interpertasi Foto Udara	112		Pribadi
2	2022	Pengelolaan DAS Berkelanjutan Berbasiskan Murbei (Morris sp)	102	978-623-99476-2-0	UMSB PRESS
3	2022	Pengolahan Lahan Gambir Untuk Pengelolaan DAS Berkelanjutan	156	978-623-99476-0-6	UMSB PRESS

VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No	Tahun	Judul/tema HKI	Jenis	No P/ID

VIII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No	Tahun	Judul/tema/jenis rekayasa lainnya yang telah diterapkan	Tempat penerapan	Respon masyarakat
1	2020	Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	Positif
2	2022	Peraturan Daerah Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	Positif

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Padang 20 Nopember 2022
Pengusul

dto

(Dr. Ir. Firman Hidayat, MT)

B. CV Anggota Tim Sosial Ekonomi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. PROFIL DIRI		
1.	Nama Lengkap	: Muhamad Reza
2.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3.	Umur	: 38 Tahun
4.	Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 9 Mei 1984
5.	Kewarganegaraan	: Indonesia
6.	Negeri Asal	: Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
7.	Pekerjaan	: Dosen Yayasan di Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
8.	Golongan/Pangkat/jabatan	: IIIc/Penata/Lektor (300)
9.	Bidang Keahlian	: Sosial Ekonomi Pertanian
10.	NIK	: 110110265
11.	NIDN	: 1009058401
12.	Scopus ID	: 57195482985
13.	ID google scholar	: user=cFmUZkEAAAAJ&hl=id
14.	SINTA ID	: 5978363
15.	Alamat e-mail	: rezaumsb@gmail.com
16.	Nomor Telpon/HP	: 081266221189
17.	Rekening Bank	: Bank Nagari: 1013.0210.11354-2

B. RIWAYAT PENDIDIKAN			
	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Pascasarjana Universitas Andalas	Pascasarjana Universitas Andalas
Prodi/Jurusan	Sosial Ekonomi Peternakan	Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	Ilmu Pertanian, Pemusatan Pembangunan Pertanian
Bidang Ilmu	Sosek Peternakan	Sosial Ekonomi Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian
Tahun Masuk-Lulus	2002-2006	Agustus 2008-Mei 2010	Agustus 2014 – April 2018
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Sistem Pemasaran Dadih Di Sumatera Barat	Analisa Penyebaran Teknologi Embrio	Ikatan Sesama Petani dalam Kelompok Tani Sebagai Basis Pada

		Transfer Pada Sapi Potong Antara Wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.	Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota
--	--	--	---

C. PENGALAMAN PEKERJAAN DAN JABATAN			
No	Intitusi/Lembaga	Jabatan	Periode Kerja
1.	Kementerian Investasi dan PT. SUCOVINDO	Ketua Tim Projeck Penyusunan Pra FS Industri Pengolahan Gambir dan Kelapa di Sumatera Barat	2021-2022
2.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Ketua LPPM-UMSB	2020-2022
3.	PC. ISPI Sumatera Barat	Wakil Ketua	2020-2024
4.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Tim Penyusun Kurikulum Kampus Merdeka UMSB	2020
5.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Ketua LPPM-UMSB	2019-2020
6.	CV. Bhumi Pratama Sainifik	Wakil Direktur	Sampai saat ini.
7.	Fakultas Peternakan UNAND	Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	2018
8.	PT. Yakin Trafindo Konsultan.	Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	2017 s/d sekarang
9.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNAND	Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Pertanian	2017-2020.
10.	CV. Poly Arsitektur	Staf Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	2013 s/d sekarang
11.	Sekretariat Bakorluh Sumbar	Anggota Komisi Penyuluhan Sumbar	2013 s/d 2017
12.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Ketua LPPM-UMSB	2013-2014
13.	NGO Mercycorps	Konsultan VCA Kab.Kep.Mentawai	2013
14.	Dinas Peternakan Provinsi Sumbar	Konsultan	2013

15.	LPPM UMSB	Ketua Pengabdian Masyarakat	2013
16.	CV. Gunung Nago	Konsultan SDM Farm Ayam Ras Petelur	2012
17.	Dinas Peternakan Sumatera Barat	Konsultan dan peneliti	2012
18.	Bappeda Provinsi Sumbar	Peneliti Mitra Dewan Riset Daerah Sumbar Bidang Pertanian/Peternakan	2011 - 2015
19.	Fakultas Pertanian UMSB	Dosen Tetap Yayasan	2011 sampai sekarang
20.	Universitas Andalas	Peneliti dan Koordinator Lapangan evaluasi program P3Dm Mercycroup	Agustus - September 2010
21.	Universitas Andalas	Staf Ahli Bidang Pangan Hewani Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	8 Oktober - 30 Desember 2010
22.	Pusat Pengkajian Kehutanan dan Lingkungan (PPKL) UMSB.	Anggota penyusunan AMDAL IUPHHK-HA di Kab. Sijunjung oleh PT. Multikarya Lisun Prima.	Juli 2009
23.	Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia	Panitia Semnas Aspi bidang pembuatan prosiding.	April-Agustus 2009
24.	Prodi. SOSEK Fakultas Peternakan UNAND	Asisten Dosen	2008-2010
25.	Prodi. SOSEK Fakultas Peternakan UNAND	Dosen Luar Biasa	2010-2011
26.	CV.Gunung Nago Farm Cab.Lbk. Minturun	Pengawas Produksi Ayam Ras Petelur	2007-2008
27.	LSM Jemari Sakato	Enumerator	27 Februari - 2 Maret 2007

D. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (juta rupiah)
1.	2014	Kebijakan dan Strategi Kesiapan Ekonomi Masyarakat Menghadapi Dampak Bencana Alam Melalui Usaha Ternak Unggas Lokal (ITIK) Berbasis Nagari Di Kab. Padang Pariaman. (tahun ke 2)	DRPM	45
2.	2014	Rencana Strategis Sekretariat Bakorluh Sumbar 2014-2019	Bakorluh Sumbar	35
3.	2014	Grand Desain Pengembangan	CV.	185

		Ekonomi Masyarakat Kota Pariaman	Polyarsitektur	
4.	2014	Rencana Induk Pembangunan Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh	CV. Polyarsitektur	175
5.	2015	Proses Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.	BPPDN Kemenristek Dikti	5
6.	2015	<i>Agricultural extension services in the achievements of endurance and self-reliance food in Indonesia: weakness and Workforce Improvement Extension officer</i>	BPPDN Kemenristek Dikti	5
7.	2016	Roadmap Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Kasus Studi: Pertanian Padi Sawah Organik).	DRPM	50
8.	2016	Persepsi Petani Terhadap Pertanian Padi Sawah Organik di Nagari Simarasok.	DRPM	11,6
9.	2016	Kajian Kompetisi Lahan Pembangunan Pertanian Pangan Dengan Perumahan Dan Permukiman Dalam Perspektif Perencanaan Wilayah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Sumatera Barat Tahun I	Hibah Guru Besar UNAND	120
10.	2016	Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Berbasis Ikatan Sesama Petani dan Hubungannya dengan Partisipasi Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.	BPPDN Kemenristek Dikti	50
11.	2017	Kajian Proses Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Berbasis Ikatan Sesama Petani Sebagai Penunjang Pencapaian Tujuan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota	Hibah Doktor DRPM Ristek Dikti	50
12.	2017	Kajian Kompetisi Lahan Pembangunan Pertanian Pangan Dengan Perumahan Dan Permukiman Dalam Perspektif Perencanaan Wilayah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Sumatera Barat Tahun II	Hibah Guru Besar UNAND	120
13.	2017	RPIK Kabupaten Lima Puluh Kota 2018-2038	APBD	160
14.	2017	Survei Sosial Ekonomi Calon Petani Penerima Program Cetak Sawah Baru di Provinsi Kepulauan Riau	APBN	50
15.	2018	Studi Kelayakan Pengembangan Sapi Potong melalui Kegiatan Pembibitan	APBD	48

		di Kota Payakumbuh.		
16.	2018	Sinergi Perencanaan Lahan Pertanian Pangan dan Perumahan Permukiman Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Propinsi Sumatera Barat	Hibah Guru Besar UNAND	110
17.	2018	Survei Sosial Ekonomi Calon Petani Penerima Program Cetak Sawah Baru di Kabupaten Lingga.	APBN	50
18.	2018	Grand Desain Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD	160
19.	2018	Peran Media Massa dalam Pembangunan Peternakan, khususnya pada Komoditi Sapi Perah di Kota Padang Panjang.	Kemenristekdikti	85
20.	2018	Kajian Produksi Hasil Pangan Kota Padang Panjang.	APBD	48
21.	2018	Penyusunan Dan Penelitian Pembinaan Kelompok Dalam Perkembangan Kegiatannya Ditinjau Dari Berbagai Aspek Ekonomi Pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Penguatan Sarana Dan Prasarana Sentra Ikm Kota Padang	PT. Yakin Trafindo Konsultan	42
22.	2019	Sinergitas Wisata Bahari dengan Wisata Sosial Budaya di Kab, Kepulauan Mentawai	Pascasarjana UNAND	50
23.	2019	Survei Penetapan Satuan Harga Belanja Pemerintah Kota Padang	PT. Yakin Trafindo Konsultan	30
24.	2019	Survei Kondisi Sosial Ekonomi Calon Petani Program Cetak Sawah Baru di Sumatera Barat	Kerjasama LPPM UNAND dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	150
25.	2019	Penyusunan Rencana Bisnis Blud UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota payakumbuh	PT. Yakin Trafindo Konsultan	69
26.	2019	Kajian Analisa dan Evaluasi Nagari Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat	Kerjasama LPPM UNAND dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera	63

			Barat	
27.	2019	Kajian Perencanaan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pasaman Barat.	Kerjasama LPPM UNAND dengan BAPPEDA Kab. Pasaman Barat.	150
28.	2020	Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Padang tahun anggaran 2020	APBD Pemerintah Kota Padang	65
29.	2020	Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Desa Tempatan Nagari Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.	Dana Nagari Dusun Tengah	180
30.	2020	Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Hortikultura Kota Payakumbuh.	APBD Kota Payakumbuh.	64,99
31.	2021	Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Yang Siap Ditawarkan Di Sektor Pengembangan Kawasan, Industri Yang Terintegrasi Dengan Kawasan, Infrastruktur Penunjang Kawasan, Dan Pariwisata : "Pra Fs Industri Pengolahan Hasil Gambir Dan Kelapa Di Sumatera Barat".	APBN	300
32.	2021	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Desa Wisata Cubadak Mentawai di Kecamatan Pariaman Timur Kora Pariaman	APBDes	79,15
33.	2022	Kajian Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Padang	APBD	50
34.	2022	Kajian Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Kepulauan Mentawai	APBD	400
35.	2022	Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Yang Siap Ditawarkan "Perkebunan Jeruk Siam Madu di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara"	APBN	300

E. PENGALAMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (juta rupiah)
1.	2014	Workshop "Metode ZOPP Sebagai Alternatif Dalam Menyusun Rencana Induk Pembangunan Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh"	CV. Poly Arsitektur dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh	45
2.	2018	Narasumber pada Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Tani	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat.	
3.	2018	Tim Perumus Soal dan Juri Lomba Asah Terampil, Peragaan, Unjuk Tangkas, Temu Karya pada Acara Prapada Sumatera Barat.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat.	
4.	2018	Narasumber pada Workshop Pengembangan Profesi Penyuluh Pertanian di Bidang Karya Tulis Ilmiah.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat.	
5.	2019 (Juli)	Narasumber Utama Seminar Penyuluhan Pertanian " Mengkontruksi Pengalaman Kerja Penyuluh Pertanian Menjadi Karya Tulis Ilmiah"	Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung	
6.	2019 (Mei-Septem baer)	Tim Perumus Soal dan Juri Lomba Asah Terampil, pada kegiatan PEDTA KTNA Sumatera Barat.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

			Sumatera Barat.	
7.	2019 (Sept-November)	Narasumber utama Training Penyuluh Pertanian " Karya Tulis Ilmiah" Kota Padang	Dinas Pertanian Kota Padang	
8.	2019 (10 Oktober)	Narasumber pada Penyerahan Hibah / Bantuan Barang Kepada Masyarakat di Rocky Plaza Hotel Padang 2019 dengan judul materi "Optimalisasi Kelompok KUBE yang Berkelanjutan"	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	
9.	2019 (Desember)	Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Dharmasraya dengan judul materi "Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menunjang Program dan Visi Daerah".	Kerjasama LPPM UMSB-Sekretariat DPRD Dharmasraya.	
10.	2020	Workshop Penyusunan Proposal Hibah Penelitian Dikti dan Internal UMSB	UMSB.	
11.	2021	Fasilitasi Pembangunan Desa Wisata Cubadak Mentawai: "Taman Kupu-kupu"	Kerjasama LPPM UM Sumatera Barat dgn Pemerintah Desa Cubadak Mentawai	

F. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/No/ Tahun
1.	2012	Model Penyebaran Teknologi Embrio Trasfer Sapi Potong Lintas Wilayah Kabupaten di Sumbang.	Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah MENARA Ilmu.	VI/no.32, November 2012
2.	2013	Peran Lembaga Lokal Adat dalam Tahapan Pembangunan Desa di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.	Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah MENARA Ilmu.	Vol. III , No.36, Maret 2013, ISSN 1693-2617
3.	2013	Kebijakan Pemerintah Dalam Menciptakan Kesiapan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Dalam Menghadapi Dampak Bencana Alam di Kabupaten Padang Pariaman	Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah MENARA Ilmu.	Vol. VII , No.40, September 2013, ISSN 1693-2617
4.	2013	Difusi Inovasi Teknologi Embrio Transfer Lintas Wilayah	Prosiding Seminar Nasional	ISBN: 978-602-18656-

		Kabupaten Melalui Pendekatan Institusi di Sumatera Barat.	UIN SUSKA Riau	5-1
5.	2014	Strategi Implementasi Rekomendasi Kebijakan Kesiapan Ekonomi Masyarakat Menghadapi Dampak Bencana Alam Melalui Usaha Ternak Unggas Lokal (Itik) Berbasis Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman.	Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah MENARA Ilmu.	Vol. VIII , No.52, September 2014, ISSN 1693-2617
6.	2014	Kajian Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Program Satu Petani Satu Sapi (SPSS) Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Di Sumatera Barat.	Prosiding Seminar Nasional Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman	ISBN: 978-979-9204-98-1 (335 s/d 334).
7.	2016	Proses Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.	Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah MENARA Ilmu.	Vol. X Jilid 1 No.63, Januari 2016, ISSN 1693-2617
8.	2017	Land Policy for Sustainable Agricultural Land and its Implementation: Experiences from West Sumatra	Jurnal terindeks Scopus Q2: International Journal on Advance Science Engineering Informastion Technology (IJASEIT)	Vol.7, No.04
9.	2018	Benefits Of Social Ties In Farmer Groups At Agricultural Extension Planning In The District Of Lima Puluh Kota, Indonesia	International Journal Agricultural Extension	Volume 06 (01) 2018. Pp 17-24
10	2018	A Challenge in Providing Housing Land and Sustainable Agricultural Land; An Effort to Meet The Backlog of Housing and Food Security in West Sumatra.	Jurnal terindeks Scopus Q2: International Journal on Advance Science Engineering Informastion Technology (IJASEIT)	Vol.8, No. 6.
11	2019	Hubungan Ikatan Anggota Kelompok Tani dengan Partisipasinya pada Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	Jurnal Penyuluhan	Maret 2019 Vol. 15 No. 1
12	2019	Agricultural Extension Planning Pattern at Level of <i>Nagari</i> (Minangkabau Traditional Village) Based on Bonding Capital in	Jurnal terindeks Scopus Q2: International Journal on	Vol.9, No. 4.

		Group of Farmers in Lima Puluh Kota District, Indonesia	Advance Science Engineering Informastion Technology (IJASEIT)	
--	--	---	---	--

G. Pemakalah Seminar Ilmiah			
No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional UIN Suska Riau	Difusi Inovasi Teknologi Embrio Transfer Lintas Wilayah Kabupaten Melalui Pendektan Instintusi di Sumatera Barat	Pekanbaru, 2013
2.	Seminar Nasional Fakultas Peternakan UNDIP	Kajian Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Program Satu Petani Satu Sapi (SPSS) Dalam Peningkatan Pendapatan Petani di Sumatera Barat	Purwokerto, 2013
3.	Workshop	Kerentanan dan Kapasitas Kab.Kep.Mentawai	Bappeda Kep. Mentawai, 2013
4.	Seminar Nasional DIKTI	Model Penyebaran Teknologi Embrio Transfer Sapi Potong Lintas Wilayah Kabupaten Kota di Sumatera Barat.	Padang, 2014
5.	Seminar Internasional	The Role of Agricultural Extension in the Development Planning of Agricultural Sector	Pascasarjana UNAND, 2014
6.	Seminar Internasional	Agricultural extension services in the achievements of endurance and self-reliance food in Indonesia: weakness and Work force Improvement Extension officer	Nong Lam University and Rex Hotel-Ho Chi Minh City, Vietnam 17 s/d 18 -11- 2015
7.	Seminar Nasional	Rencana Wilayah Pengembangan Pertanian Organik Di Kabupaten Agam (Kasus Studi: Padi Sawah Organik)	Semirata BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian, Lhokseumawe, 04-06 Agustus 2016
8.	Seminar Nasional	Persepsi Petani Terhadap Pertanian Padi Sawah Organik di Nagari Simarasok	Seminar Hasil Program Peningkatan Kapasitas Riset (PDP) 17-18 Maret 2017 di Padang

9.	Seminar Nasional	Pemberdayaan Penyuluh Peternakan untuk Menjabatani Peternak Sapi Potong dengan Subsistem Hulu dan Hilir di Sumatera Barat.	Seminar Nasional Persepsi II 28-29 April 2017 di Bali.
10.	Seminar Internasional	Optimizing the Role of Agricultural Field Extension in Sustainable Land Farming Planning in the Era of Regional Autonomy	International Conference Sustainable Agriculture, Food and Energy 2017 (SAFE 2017) di Malaysia
11.	Seminar Nasional	Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian untuk Mengoptimalkan Kualitas Petani Tempatan dalam Mengelola Lahan Sawah Baru di Kabupaten Lingga	Semnas pkppm Pascasarjana UNAND 2019
12	Seminar Internasional	LPHN Member Participation in Nagari Pasir Talang Timur Forest in the Empowerment Program through Beef Cattle Fattening	International Conference Sustainable Agriculture, Food and Energy 2019 (SAFE 2019) Phuket, Thailand. October 2019.

H. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun				
No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Pengantar Ilmu Penyuluhan Pertanian	2018	320	Andalas University Press
2.	Dinamika Pembangunan Peternakan Pengalaman dan Harapan.	2018	252	Andalas University Press
3.	Perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan "Penerapan dan Kritik terhadap Penerapan Kebijakan"	2018	132	Nas Media

I. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam (dari pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)			
No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Pemateri Utama Kajian Kerentanan	MercyCorops	2013

	dan Kapasitas Kab.Kep.Mentawai		
2.	Penulis Poster Ilmiah Terbaik pada Seminar Hasil Program Peningkatan Kapasitas Riset (PDP)	DRPM Ristekdikti	2017
3.	Presenter Terbaik pada Seminar Nasional PERSEPSI II di Bali	Perhimpunan Ilmuan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia (PERSEPSI)	2017
4.	1 dari 100 alumni universitas andalas sebagai tokoh yang diterbitkan dalam buku "Seratus Sketsa Untuk Kejayaan Bangsa Vol.II.	IKA Unand	2021

Padang, 19 November 2022



(Dr. Muhamad Reza, M.Si)

C. CV Anggota Tim Statistik Sosial Ekonomi

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Revi Ernanda, SP., M.Si.
 NIDN : 1029109301
 Temp/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 29 Oktober 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Pangkat/Golongan : Penata Muda /IIIb
 Instansi : Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian,
 Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Barat
 Alamat Rumah : Jalan Kapten Tantawi, No. 101,
 Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota
 Payakumbuh, Sumatera Barat.
 E-mail : reviernanda@gmail.com
 No. HP : 081363170342

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Instansi	Jurusan/ Program Studi
2005	Sekolah Dasar	SD N 01 Balai Jaring Air Tabit	
2008	SLTP	SMP N 3 Payakumbuh	
2011	SLTA	SMAN 2 Payakumbuh	
2015	Sarjana (S1)	Universitas Andalas Padang	Agribisnis
2018	Magister (S2)	Institut Pertanian Bogor	Sains Agribisnis

C. RIWAYAT PEKERJAAN**1. Riwayat Kepangkatan/Golongan**

No	Pangkat	Golongan Ruang	TMT
1	Penata Muda Tk.I	III/b	01-12-2020

2. Riwayat Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Golongan Ruang Penggajian	TMT
1	Asisten Ahli	IIIb	06-11-2020

D. BIDANG PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH

No	Tahun	Judul	Keterangan/Bukti Fisik	Link URL	Status
1	2022	<u>Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Usaha pada Industri Tahu di Sumatera Barat</u>	JASc Jurnal of Agribusiness Science	http://jurnal.um-su.ac.id/index.php/JASc/article/view/8885	S4
2	2021	<u>Pengaruh Faktor Individu, Faktor Lingkungan dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usahatani Jamur Tiram di Kota Payakumbuh</u>	Jurnal Galung Tropika Vol 10 (1) Hal: 98-109, 2021	http://jurnalpertanianumpar.com/index.php/jgt/article/view/722	S3
3	2020	Pengaruh Norma Sosial Julo-Julo Tenaga Kerja terhadap Kinerja Usahatani Cabai kopay di Kota Payakumbuh	Jurnal Menara Ilmu Vol 14 (1) Hal: 113-120, 2020	http://jurnal.um-sb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1868	S5
4	2019	<u>Karakteristik Modal Sosial Petani Cabai</u>	Jurnal Agriseip Vol 18 (1) Hal:	https://ejournal.unib.ac.id/index	S3

		Kopay di Kota Payakumbuh	41-52, 2019	php/agrisep/article/view/5784	
--	--	--	-------------	--	--

E. PELATIHAN/WORKSHOP/KURSUS

No	Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Peran	
1	27 Januari 2021	Workshop Penerbitan Buku Ajar Dosen Penulis UMSB	UMSB Press	Peserta	
2	29, 30 September dan 1 Oktober 2021	Training of Awareness of ISO 9001:2015 and Internal Auditor based on ISO 19011:2018	IAIN Batusangkar	Peserta	
3	23-25 Maret 2021	Workshop Kurikulum Re-Desain	LP3M UMSB	Peserta	
4	2021	Auditor Mutu Internal	LP3M UM Sumbar	Peserta	
5	2021	Auditor Halal Muhammadiyah	Halal Center UMM	Peserta	

F. KEPANITIAAN DAN KEGIATAN PENUNJANG

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Jabatan	Bukti Dokumen
1	2020	Tim Pusat Pengembangan Karir dan Tracer Study UM Sumbar	Anggota bidang Informasi dan Teknologi	
2	2021	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) UM Sumbar	Anggota bidang Akreditasi	
3	2021	Auditor Mutu Internal UM Sumbar	Anggota	
4	2021	Masjid Al-Hidayah UM Sumbar Kampu IV Payakumbuh	Bendahara	
	2021	Workshop Aplikasi Mendeley dan Kerjasama dengan FKIP Univet Bantara	Bendahara	
5	2021	Panitia Yudisium Fakultas Pertanian UM Sumbar	Koor Acara	
6	2021	Dosen Pendamping Lapangan KKN UM Sumbar	DPL	
7				

G. KARYA TULIS FIKSI DAN NON FIKSI

No	Jenis Karya	Judul	Keterangan Buku Terbit
1	Buku Referensi	Ekonomi Pertanian	Penerbit: Yayasan Kita Menulis
2	Buku Referensi	Bisnis dan Ekonomi Digital	Penerbit: Yayasan Kita Menulis
3	Buku Referensi	Ilmu Manajemen Pemasaran: Analisis dan Strategi	Penerbit: Yayasan Kita Menulis

H. KEGIATAN DI LUAR DOSEN TETAP YAYASAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dapoer Popin (Aboya Abon Pepaya)	Co Owner	Hingga sekarang
2	Pendamping Proses Produk Halal	Pendamping	2022

Ttd,



(Revi Ernanda, SP., M.Si.)

BAB III.
PENGALAMAN PEKERJAAN YANG SERUPA



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

web : dishut.sumbarprov.go.id
email : dishut@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : **522.4/727/PRMHA-2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PERHUTANAN SOSIAL
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keselarasan dalam percepatan dan perluasan pengembangan perhutanan sosial di Sumatera Barat, maka perlu di susun Peraturan Daerah yang akan dijadikan panduan dan acuan dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah dimaksud maka perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau, Jambi menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
10. Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim penyusunan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyusunan draft Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber-sumber anggaran yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

KEPALA DINAS



YOZARWARDI U.P. S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK di Jakarta
3. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK di Jakarta
4. Anggota Tim Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 522-A/1727/PPMHA-2022
Tanggal : 07 Maret 2022
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI
SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI
SUMATERA BARAT

Pembina	: Yozarwardi U.P, S.Hut, M.Si	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Pengarah	: Faridil Afrasy, S.Hut, M.M	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Ketua Tim	: Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Anggota	1. Almen, S.Hut	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
	2. Dr. Firman Hidayat	Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat
	2. Evi Rosita, SP	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
	3. Meriyenti, S.Hut, M.Si	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
	4. Ridho Fernando, S.Si	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
	5. First San Hendra Rivai, SH	LSM Q-Bar
	6. Beni Iryan Purna, SH	LSM Q-Bar
	7. Rahma Weliza	LSM Q-Bar

KEPALA DINAS



YOZARWARDI U.P. S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

BAB IV.

GARIS BESAR METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

Metodologi merupakan hal yang sangat penting dari sebuah kajian atau penelitian. Ketepatan dalam menggunakan metodologi menjamin peneliti dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Sumatera Barat telah ditetapkan 3 tujuan yaitu:

1. Memetakan persepsi stakeholder terkait pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan isu-isu terkait;
2. Melakukan studi *social network analysis* terkait hubungan antar pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
3. Rekomendasi terkait potensi konflik dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat tapak (nagari).

Merujuk pada 3 tujuan di atas, maka perlu ditetapkan metodologi dan rencana kerja sebagaimana yang dijabarkan berikut ini.

4.1. METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mixed method research*. Dimana dalam pelaksanaannya mengkombinasikan metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memperkuat antara satu metode dengan metode lainnya. *Mixed methods research* adalah suatu pendekatan untuk menyelidiki masalah yang berhubungan dengan perilaku, sosial, dan kesehatan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara ketat sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, dan mengintegrasikan atau “mencampur” dua bentuk data dalam desain penelitian tertentu untuk menghasilkan yang baru dan lebih lengkap wawasan atau pemahaman daripada apa yang mungkin diperoleh dari data kuantitatif atau kualitatif saja (Creswell, 2016). Adapun metode utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif sedangkan metode kualitatif menjadi penguat untuk temuan atau data yang didapatkan dari metode kuantitatif.

B. Jenis Penelitian

Merujuk pada tema dan tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian survei. Penelitian survei yang artinya metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan suatu data yang terjadi, baik pada masa lampau atau saat ini mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, dan hubungan variabel. Penelitian Survei adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada pada lapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah bisa berguna mendapatkan informasi yang tepat dan nyata.

C. Data dan Sumber Data

Dalam mengelompokkan data penelitian ini, digunakan pendekatan dari mana data tersebut didapatkan. Berdasarkan sumbernya, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer

Data ini merupakan data yang didapatkan langsung dari responden penelitian. Dimana data tersebut merupakan hasil pengisian kuesioner dan wawancara serta *observasi non participant* yang dilakukan oleh tim kajian. Adapun bentuk data yang tergolong kedalam jenis ini yaitu data persepsi stakeholder terkait pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan isu-isu terkait, hubungan antar pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta data untuk merumuskan rekomendasi terkait potensi konflik dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat tapak (nagari).

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang telah tersedia dari instansi, lembaga dan lainnya. Bentuk data ini berupa dokumen tentang statistik perhutanan sosial, data kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial, dokumen tentang aktivitas perekonomian masyarakat diperhutanan sosial, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Data sekunder didapatkan dari Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten, BPS, dan

kantor-kantor lainnya yang dirasa bisa memberikan data untuk kebutuhan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode triangulasi . Pemilihan teknik pengumpulan data tersebut juga mengakomodir metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi metode (Sugiyono, 2018) yaitu memadukan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk setiap tujuan penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner ini nantinya akan disebar pada responden penelitian. Dalam mengkontruksi pertanyaan penelitian dalam kuesioner ini ada yang disediakan jawaban pilihannya dan ada pertanyaan yang dibiarkan responden menjawab dengan penjelasan terbuka.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari responden terkait isu-isu strategis baik itu berupa peluang konflik dan solusi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat.

3. *Observasi non participant*

Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan lapangan di lokus-lokus yang telah ditetapkan. Tim observasi nantinya melakukan pengamatan tanpa melakukan intervensi dan terlibat langsung pada aktivitas yang diamati.

4. Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk dokumentasi ini yaitu kajian kepustakaan dengan menggunakan alat konten analisis terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam menjawab tujuan penelitian.

5. FGD

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring informasi dan data yang disampaikan oleh stakeholders terkait.

E. Sampel Wilayah dan Responden Penelitian

Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. Adapun jumlah kabupaten yang memiliki perhutanan sosial di daerah ini sebanyak 14 kabupaten/kota. Skema perhutanan sosial yang terdapat di Sumatera Barat terdiri dari 5 jenis yaitu: Hutan Nagari/Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Berdasarkan skema perhutanan sosial ini, dapat diambil sampel wilayah penelitian dengan teknik purposif yaitu menetapkan wilayah dengan sengaja melalui indikator yang ditetapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, maka sampel yang wilayah penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Sampel Wilayah Penelitian

No	Skema Perhutanan Sosial	Sampel Wilayah
1.	Hutan Nagari/Hutan Desa	Kab. Sijunjung
2.	Hutan Kemasyarakatan	Kab. Pasaman
3.	Hutan Tanaman Rakyat	Kab. Pesisir Selatan
4.	Hutan Adat	Kab. Dharmasraya
5.	Kemitraan Kehutanan	Kab. Kep. Mentawai

Sumber: diolah dari data PHBM, 2022.

Berdasarkan sampel wilayah di atas, maka ditetapkan responden dengan teknik purposif. Dimana indikator yang digunakan untuk menetapkan responden dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Kepala/perangkat bidang perhutanan sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Pimpinan/perangkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada ditingkat kabupaten.
3. Ketua bidang/perangkat pengelolaan perhutanan sosial di tingkat kabupaten.
4. Kepala/perangkat lembaga perhutanan sosial yang berada ditingkat nagari.

Merujuk pada indikator di atas, maka setiap wilayah sampel penelitian akan diambil responden sebanyak 6 orang orang dan ditambah responden dari tingkat provinsi sebanyak 3 orang. Oleh karena itu, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 orang.

F. Fokus Data Penelitian

Berdasarkan tabel berikut ini dapat terlihat fokus dan sub fokus data penelitian, dimana fokus ini sehirarki dengan variabel penelitian.

Tabel 2. Fokus Data Penelitian

No	Fokus Data	Sub Fokus Data
1.	Persepsi stakeholder terkait pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan isu-isu terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi terhadap keberadaan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. • Persepsi terhadap kinerja kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. • Persepsi terhadap manfaat kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. • Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.
2.	Hubungan antar pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi hubungan hirarki kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi. • Dinamika komunikasi kerja kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi. • Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kinerja sinergitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi. • Potensi konflik antar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi. • Bentuk/pola kerjasama antar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

3.	Rekomendasi terkait potensi konflik dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat provinsi, kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi untuk memperkuat sinergitas dan kerjasama antar lembaga pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.
----	--	---

G. Teknik Analisa Data Penelitian

Data dan informasi yang didapatkan dari penelitian ini akan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu:

1. Tujuan penelitian I di analisis dengan teknik analisis kuantitatif. Dalam hal ini menggunakan alat analisisnya berupa teknik skala linkert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Teknik ini dapat menjangkau persepsi responden terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Skala mengenai pendapat/persepsi dikelompokkan menjadi lima pilihan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).
2. Tujuan penelitian II dianalisis dengan menggunakan *software* Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS). PLS (*Partial Least Square*) merupakan model persamaan struktural SEM yang berbasis komponen atau varian. PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM yang berbasis kovarian menjadi berbasis varian.
3. Tujuan penelitian III dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, dimana alat analisis yang digunakan untuk merumuskan rekomendasi yaitu teknik sintesis dan interperatif.

4.2. RENCANA KERJA

A. Rencana Kerja

Rencana kerja untuk riset ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan penelitian/pengumpulan data dan tahapan analisis serta tahapan penyusunan luaran. Rencana kerja ini dimulai semenjak kontrak telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu LPPM UM Sumatera Barat dengan WRI. Melalui tabel berikut ini dapat terlihat secara rinci rencana kerja untuk riset ini.

Tabel 3. Rencana Kerja

No	Tahapan dan Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan 2022-2023											
		Bulan Ke 1				Bulan Ke 2				Bulan Ke 3			
I.	Persiapan:												
	1. Penyiapan administrasi	■											
	2. Penyiapan proposal	■	■										
	3. Pemetaan lokasi penelitian dan responden		■										
	4. Penyusunan instrument penelitian.		■	■									
II.	Pelaksanaan penelitian/pengumpulan data:												
	1. Pengumpulan data sekunder				■								
	2. Pengumpulan data primer				■	■	■						
	3. FGD						■						
	4. Analisis Data						■	■	■				
	5. Penyusunan draf laporan						■	■	■	■			
	6. Seminar/FGD draf laporan									■			
	7. Penyempurnaan laporan									■	■		
III.	Penyusunan luaran penelitian												
	Deliverable 1: guide pengumpulan data												■
	Deliverable 2: laporan hipotesa awal/preliminary analysis terkait gambaran pemangku kepentingan yang ada dan pengaruhnya terhadap implementasi/pengelolaan perhutanan sosial Sumatra Barat												■
	Deliverable 3: transkrip wawancara (non-verbatim / verbatim)												■
	Deliverable 4: link Google Drive berisi dokumen yang digunakan untuk review literatur.												■
	Deliverable 5: laporan riset												■

B. Struktur Tim Riset

Rencana kerja di atas akan dilaksanakan oleh tim riset yang dibarkan berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 4. Struktur Tim Riset

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Firman Hidayat	Ketua Tim/ Perhutananana Sosial
2.	Dr. Muhamad Reza, M.Si	TA. Sosial Ekonomi/Kelembagaan
3.	Revi Ernanda, SP., M.Si	TA. Statistik Sosial Ekonomi
4.	Yulia Septi Wahyuni, M.Pd	Tenaga Admnistrasi

KUESIONER

RISET KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Kerjasama
WRI Indonesia dengan LPPM UM Sumatera Barat



2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan karunianya kepada penghuni alam semesta ini. Atas kuasa-Nya kita dapat menikmati indahnya dunia ini.

Kami dari LPPM UM Sumatera Barat bekerjasama dengan WRI Indonesia bersama-sama menjalankan kegiatan Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial Sumatera Barat. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran persepsi stakeholder terkait pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan isu-isu terkait. Riset ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antar pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selanjutnya, melalui riset ini nantinya dapat menghasilkan rekomendasi terkait potensi konflik dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat tapak (nagari).

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kami meminta kesediaan dari Bapak/Ibuk untuk dapat mengisi kuesioner yang telah kami susun ini. Kuesioner ini merupakan instrument pengumpulan data untuk kepentingan riset kelembagaan. Seluruh informasi dan data yang Bapak/Ibuk berikan tidak akan kami gunakan untuk kepentingan lainnya, oleh karena itu diharapkan Bapak/Ibuk dapat memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang diketahui dan dialami.

Atas partisipasi dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Padang, Februari 2023
Ketua Tim Kajian
LPPM UM Sumatera Barat

dto

Dr. Firman Hidayat

KETERANGAN PENGISIAN KUESIONER

Kuesioner ini dikonstruksi menggunakan dua model yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Untuk kuesioner tertutup disediakan pilihan jawaban atau tanggapan yang dapat Bapak/Ibuk pilih sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan kuesioner terbuka, jawaban atau tanggapan diberikan oleh responden diberikan dalam bentuk narasi pengetahuan dan pengalamannya.

Adapun teknis pengisian kuesioner yaitu:

- Responden diminta untuk memberikan tanda centang (√) untuk setiap pilihan jawaban atau tanggapan yang telah tersedia dalam kuesioner.
- Responden diminta untuk menulis narasi jawaban atau tanggapan pada pertanyaan yang bersifat terbuka.
- Dalam pelaksanaannya setiap responden akan didampingi oleh tenaga teknis lapangan yang disediakan oleh tim kami.

PROFIL RESPONDEN

Nama Lengkap	:	
Umur	:	thn
Jenis kelamin	:	Laki-laki/perempuan
Pekerjaan	:	PNS () Swasta () Petani () Lainnya.....
Instansi	:	
Alamat domisili	:	
Telepon/HP/WA	:	

DAFTAR PERTANYAAN/PERNYATAAN

I. Memetakan Persepsi Stakeholder Terkait Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat dan Isu-Isu Terkait

Bapak/Ibuk diminta untuk memberikan tanggapan atau persepsinya melalui pilihan yang telah disediakan tentang pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Adapun pilihan jawaban yang disediakan yaitu: **SS (Sangat Setuju)**, **S (Setuju)**, **CS (Cukup Setuju)**, **TS (Tidak Setuju)**, **STS (Sangat Tidak Setuju)**. Tanggapan yang diberikan mesti disesuaikan dengan skema perhutanan social yang ditetapkan pemerintah, yaitu:

- a) Hutan Nagari/Hutan Desa
- b) Hutan Kemasyarakatan
- c) Hutan Tanaman Rakyat
- d) Hutan Adat
- e) Kemitraan Kehutanan

A. Hutan Nagari/Hutan Desa

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
Pernyataan (+)						
1.	Pengelolaan hutan nagari mesti berbasis masyarakat.					
2.	Masyarakat memiliki kewenangan dalam mengelola hutan nagari.					
3.	Sumberdaya yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mengelola hutan nagari					
4.	Untuk mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan nagari dibutuhkan kelembagaan dari tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
5.	Kelembagaan pengelolaan hutan nagari yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah terbentuk.					
6.	Kelembagaan pengelolaan hutan nagari yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah dilegalkan.					
7.	SDM pengelola kelembagaan hutan nagari tersedia lengkap dan mumpuni.					
8.	Tersedianya anggaran dana untuk menjalankan kelembagaan dalam mengelola hutan nagari.					
9.	Lengkapnya sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan nagari					
10.	Adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan nagari/desa.					
11.	Kinerja kelembagaan pengelolaan hutan nagari telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
12.	Masyarakat telah merasakan manfaat terhadap keberagaan kelembagaan yang mengelola hutan nagari/desa.					
Pernyataan (-)		STS	TS	CS	S	SS
1.	Tidak selalu hutan nagari dikelola oleh masyarakat.					
2.	Masyarakat tidak diwajibkan mengelola hutan nagari.					
3.	Masyarakat tidak memiliki sumberdaya dalam mengelola hutan nagari					
4.	Pemerintah dapat langsung mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan nagari/hutan desa.					
5.	Belum ada kelembagaan pengelolaan hutan nagari yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
6.	Belum legalnya kelembagaan pengelolaan hutan nagari yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
7.	Belum lengkapnya SDM pengelola kelembagaan hutan nagari.					
8.	Anggaran dana terbatas dalam menjalankan kelembagaan untuk mengelola hutan nagari.					
9.	Belum tersedia sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan nagari.					
10.	Masih minim kegiatan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan nagari/desa.					
11.	Belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan hutan nagari.					
12.	Belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan yang mengelola hutan nagari/desa.					

Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.	
a) Apasaja dukungan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan nagari?	:
b) Apasaja hambatan yang dihadapi dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan nagari ?	:

B.HUTAN KEMASYARAKATAN

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
Pernyataan (+)						
1.	Pengelolaan hutan kemasyaratan mesti berbasis masyarakat.					
2.	Masyarakat memiliki kewenangan dalam mengelola hutan kemasyaratan.					
3.	Sumberdaya yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mengelola hutan kemasyaratan.					
4.	Untuk mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan kemasyaratan dibutuhkan kelembagaan dari tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
5.	Kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah terbentuk.					
6.	Kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah dilegalkan.					
7.	SDM pengelola kelembagaan hutan kemasyaratan tersedia lengkap dan mumpuni.					
8.	Tersedianya anggaran dana untuk menjalankan kelembagaan dalam mengelola hutan kemasyaratan.					
9.	Lengkapnya sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan kemasyaratan					
10.	Adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan.					
11.	Kinerja kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
12.	Masyarakat telah merasakan manfaat terhadap keberagaan kelembagaan yang mengelola hutan kemasyaratan.					
Pernyataan (-)		STS	TS	CS	S	SS
1.	Tidak selalu hutan kemasyaratan dikelola oleh masyarakat.					
2.	Masyarakat tidak diwajibkan mengelola hutan kemasyaratan.					
3.	Masyarakat tidak memiliki sumberdaya dalam mengelola hutan kemasyaratan.					
4.	Pemerintah dapat langsung mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan kemasyaratan.					
5.	Belum ada kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
6.	Belum legalnya kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
7.	Belum lengkapnya SDM pengelola kelembagaan hutan kemasyaratan.					
8.	Anggaran dana terbatas dalam menjalankan kelembagaan untuk mengelola hutan kemasyaratan.					
9.	Belum tersedia sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan kemasyaratan.					
10.	Masih minim kegiatan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan.					
11.	Belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan hutan nagari.					
12.	Belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan yang mengelola hutan kemasyaratan.					

Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.	
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja dukungan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan? 	:
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja hambatan yang dihadapi dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan ? 	:

C. HUTAN TANAMAN RAKYAT

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
Pernyataan (+)						
1.	Pengelolaan hutan tanaman rakyat mesti berbasis masyarakat.					
2.	Masyarakat memiliki kewenangan dalam mengelola hutan tanaman rakyat.					
3.	Sumberdaya yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mengelola hutan tanaman rakyat.					
4.	Untuk mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan tanaman rakyat dibutuhkan kelembagaan dari tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
5.	Kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah terbentuk.					
6.	Kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah dilegalkan.					
7.	SDM pengelola kelembagaan hutan tanaman rakyat tersedia lengkap dan mumpuni.					
8.	Tersedianya anggaran dana untuk menjalankan kelembagaan dalam mengelola hutan tanaman rakyat.					
9.	Lengkapnya sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan tanaman rakyat.					
10.	Adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat.					
11.	Kinerja kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
12.	Masyarakat telah merasakan manfaat terhadap keberagaan kelembagaan yang mengelola hutan tanaman rakyat.					
Pernyataan (-)		STS	TS	CS	S	SS
1.	Tidak selalu hutan tanaman rakyat dikelola oleh masyarakat.					
2.	Masyarakat tidak diwajibkan mengelola hutan tanaman rakyat.					
3.	Masyarakat tidak memiliki sumberdaya dalam mengelola hutan tanaman rakyat.					
4.	Pemerintah dapat langsung mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan tanaman rakyat.					
5.	Belum ada kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
6.	Belum legalnya kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
7.	Belum lengkapnya SDM pengelola kelembagaan hutan tanaman rakyat.					
8.	Anggaran dana terbatas dalam menjalankan kelembagaan untuk mengelola hutan tanaman rakyat.					
9.	Belum tersedia sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan tanaman rakyat.					
10.	Masih minim kegiatan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat.					
11.	Belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat.					
12.	Belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan yang mengelola hutan tanaman rakyat.					

Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.	
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja dukungan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat? 	:
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja hambatan yang dihadapi dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat ? 	:

D. HUTAN ADAT

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
Pernyataan (+)						
1.	Pengelolaan hutan adat rakyat mesti berbasis masyarakat.					
2.	Masyarakat memiliki kewenangan dalam mengelola hutan adat.					
3.	Sumberdaya yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mengelola hutan adat.					
4.	Untuk mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan adat dibutuhkan kelembagaan dari tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
5.	Kelembagaan pengelolaan hutan adat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah terbentuk.					
6.	Kelembagaan pengelolaan hutan adat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah dilegalkan.					
7.	SDM pengelola kelembagaan hutan adat tersedia lengkap dan mumpuni.					
8.	Tersedianya anggaran dana untuk menjalankan kelembagaan dalam mengelola hutan adat.					
9.	Lengkapnya sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan adat.					
10.	Adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan adat.					
11.	Kinerja kelembagaan pengelolaan hutan adat telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
12.	Masyarakat telah merasakan manfaat terhadap keberagaan kelembagaan yang mengelola hutan adat.					
Pernyataan (-)		STS	TS	CS	S	SS
1.	Tidak selalu hutan adat dikelola oleh masyarakat.					
2.	Masyarakat tidak diwajibkan mengelola hutan adat.					
3.	Masyarakat tidak memiliki sumberdaya dalam mengelola hutan adat.					
4.	Pemerintah dapat langsung mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan adat.					
5.	Belum ada kelembagaan pengelolaan hutan adat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
6.	Belum legalnya kelembagaan pengelolaan hutan adat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
7.	Belum lengkapnya SDM pengelola kelembagaan hutan adat.					
8.	Anggaran dana terbatas dalam menjalankan kelembagaan untuk mengelola hutan adat.					
9.	Belum tersedia sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan adat.					
10.	Masih minim kegiatan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan adat.					
11.	Belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan hutan adat.					
12.	Belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan yang mengelola hutan adat.					

Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.	
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja dukungan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan adat ? 	:
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja hambatan yang dihadapi dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan adat ? 	:

E. KEMITRAAN KEHUTANAN

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
Pernyataan (+)						
1.	Pengelolaan hutan kemitraan mesti berbasis masyarakat.					
2.	Masyarakat memiliki kewenangan dalam mengelola hutan kemitraan.					
3.	Sumberdaya yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mengelola hutan kemitraan.					
4.	Untuk mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan kemitraan dibutuhkan kelembagaan dari tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
5.	Kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah terbentuk.					
6.	Kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah dilegalkan.					
7.	SDM pengelola kelembagaan hutan kemitraan tersedia lengkap dan mumpuni.					
8.	Tersedianya anggaran dana untuk menjalankan kelembagaan dalam mengelola hutan kemitraan.					
9.	Lengkapnya sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan kemitraan.					
10.	Adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan.					
11.	Kinerja kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
12.	Masyarakat telah merasakan manfaat terhadap keberagaan kelembagaan yang mengelola hutan kemitraan.					
Pernyataan (-)		STS	TS	CS	S	SS
1.	Tidak selalu hutan kemitraan dikelola oleh masyarakat.					
2.	Masyarakat tidak diwajibkan mengelola hutan kemitraan.					
3.	Masyarakat tidak memiliki sumberdaya dalam mengelola hutan kemitraan.					
4.	Pemerintah dapat langsung mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan kemitraan.					
5.	Belum ada kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
6.	Belum legalnya kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
7.	Belum lengkapnya SDM pengelola kelembagaan hutan kemitraan.					
8.	Anggaran dana terbatas dalam menjalankan kelembagaan untuk mengelola hutan kemitraan.					
9.	Belum tersedia sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan kemitraan.					
10.	Masih minim kegiatan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan.					
11.	Belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan.					
12.	Belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan yang mengelola hutan kemitraan.					

Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.

<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja dukungan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan ? 	:	
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja hambatan yang dihadapi dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan kemitraan? 	:	

II. Social Network Analysis Terkait Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Bapak/Ibuk diminta untuk memberikan tanggapan atau persepsinya melalui pilihan yang telah disediakan tentang pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.

A. Kondisi hubungan hirarki kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

Untuk jawaban pada poin ini Bapak/ Ibu diminta mengisi matriks pada lampiran sesuai Skema Kelembagaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

1. Skema Hutan Desa



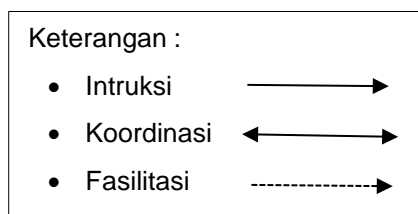
2. Skema Hutan Kemasyarakatan



3. Skema Tanaman Rakyat



4. Skema Kemitraan Kehutanan



5. Hutan Desa



B. Dinamika komunikasi kerja kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban	
		Iya	Tidak
1.	Pola komunikasi antar Lembaga adalah satu arah		
2.	Terjadinya komunikasi dua arah atau timbal balik antar Lembaga		
3.	Terjadinya pola komunikasi multi arah antar lembaga		
4.	Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah		
5.	Lembaga pada hirarki yang lebih rendah tidak bisa mengambil kebijakan tanpa adanya persetujuan dari Lembaga pada hirarki yang lebih tinggi		
6.	Terdapat pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar lembaga		
7.	Adanya komunikasi yang terbuka dan komunikatif antar anggota dalam satu lembaga		
8.	Setiap anggota kelompok memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide, kritikan dan saran		
9.	Komunikasi dilakukan secara tertulis dan bersifat formal		
10.	Komunikasi dapat dilakukan secara lisan		

C. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kinerja sinergitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban		
		Ada	Cukup Ada	Tidak Ada
A.	Admistrasi dan Kelembagaan			
1.	Tersedianya lembaga pengelolaan perhutanan social memiliki susunan pengurus disetiap tingkatan wilayah administrative dan memiliki pembagian tugas yang jelas			
2.	Lembaga pengelolaan perhutanan social memiliki catatan administrasi yaitu buku kas, buku daftar anggota, buku tamu dan buku inventaris			
3.	Lembaga pengelolaan perhutanan social memiliki sertifikat pengesahan dari Lembaga resmi			
4.	Adanya kelengkapan sarana dan prasaran adiministrasi dan kelembagaan			

	pengelolaan perhutanan sosial			
5	Adanya ketersediaan anggaran dana untuk operasional kelembagaan pengelolaan perhutanan sosial			
6	Terjalannya komunikasi administrasi dan birokrasi antar kelembagaan perhutanan sosial			
B. Aktivitas Kelompok				
1.	Setiap kelembagaan yang berada pada masing-masing tingkatan Memiliki rencana kerja yang sudah disahkan			
2.	SDM yang berada dalam kelembagaan pengelolaan perhutanan social memahami dan melaksanakan rencana kerja			
3.	SDM kelembagaan pengelola perhutanan social telah merealisasikan kegiatan usaha (Budidaya tanaman obat, Budidaya tanaman hias, Budidaya jamur, Budidaya lebah, Penangkaran satwa liar, Rehabilitasi satwa, Budidaya hijauan makanan ternak) yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.			
4.	Anggota Lembaga dan masyarakat mendapatkan manfaat dari areal perhutanan sosial yang dikelola			
5.	Lembaga pengelola perhutanan social melakukan pemanfaatan jasa lingkungan seperti Pemanfaatan jasa aliran ai, Pemanfaatan air, Wisata alam, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penyerapan atau penyimpanan karbon.			
6.	Lembaga pengelola perhutanan social memiliki koperasi dan sudah bermitra			
7.	Lembaga pengelola perhutanan social telah melakukan aktivitas pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu			
8.	Melakukan pertemuan rutin dalam anggota Lembaga dan juga antar lembaga			
	Tersedianya alokasi anggaran untuk aktivitas kelompok pengelola perhutanan sosial			
	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan rencana kerja kelompok			
C. Pelaporan				
1.	Lembaga pengelola perhutanan social menyampaikan laporan tepat waktu dan sesuai dengan kelengkapan yang ditentukan			
2.	Lembaga pengelolaan perhutanan social memiliki semua dokumentasi kegiatan			
3.	Telah memiliki dan menerapkan system pelaporan untuk setiap kelembagaan perhutanan sosial			
4.	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan			

D. Potensi konflik antar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

Lembaga di Tingkat Desa	:	
<ul style="list-style-type: none"> Apa saja konflik yang dialami oleh pengelola Lembaga pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? 		
<ul style="list-style-type: none"> Siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? 		

<ul style="list-style-type: none"> • Kapan konflik terjadi dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? • Mengapa konflik dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? • Dimana terjadinya konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? • Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? 		
<p>Lembaga di Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja konflik yang dialami oleh pengelola Lembaga pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Kapan konflik terjadi dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Mengapa konflik dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Dimana terjadinya konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? 		
<p>Lembaga di Tingkat Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja konflik yang dialami oleh pengelola Lembaga pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? • Siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? • Kapan konflik terjadi dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat 	:	

Kabupaten? <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa konflik dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? • Dimana terjadinya konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? • Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? 	:	
Lembaga di Tingkat Provinsi	:	
<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja konflik yang dialami oleh pengelola Lembaga pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Kapan konflik terjadi dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Mengapa konflik dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Dimana terjadinya konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		

E. Bentuk/pola kerjasama antar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban	
		Ada	Tidak Ada
1.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat nagari mendapatkan bantuan modal dari pengelola perhutanan social di tingkat kabupaten/ kota		
2.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat kabupaten/kota mendapatkan bantuan modal dari pengelola perhutanan social di tingkat provinsi		
3.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat Provinsi mendapatkan bantuan modal dari pengelola perhutanan social di tingkat nasional		

4.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat nagari mendapatkan pembinaan manajemen usaha dan bantuan sarana dari pengelola perhutanan social di tingkat kabupaten/ kota		
5.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat kabupaten/kota mendapatkan pembinaan manajemen usaha dan bantuan sarana dari pengelola perhutanan social di tingkat provinsi		
6.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat Provinsi mendapatkan pembinaan manajemen usaha dan bantuan sarana dari pengelola perhutanan social di tingkat nasional		
7.	Lembaga pengelolaan perhutanan di tingkat nagari/desa memiliki mitra		
8.	Lembaga pengelolaan perhutanan di tingkat kabupaten/ kota memiliki mitra		
9.	Lembaga pengelolaan perhutanan di tingkat provinsi memiliki mitra		

III. Rekomendasi terkait potensi konflik dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat tapak (nagari).

**MATRIK KERANGKA KERJA
RISET KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DIPERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Tujuan	Fokus Data	Sub Fokus Data	Teknik Pengumpulan data / instrumen	Responden	Lokasi	Analisis	Luaran
1.	Memetakan persepsi stakeholder terkait pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan isu-isu terkait	Persepsi stakeholder terkait pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan isu-isu terkait.	<ul style="list-style-type: none"> Persepsi terhadap keberadaan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Persepsi terhadap kinerja kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Persepsi terhadap manfaat kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. 	Kuesioner +Wawancara (daring/luring)	33 orang dari: <ol style="list-style-type: none"> Kepala/perangkat bidang perhutanan sosial Provinsi Sumatera Barat (3 orang). Pimpinan/perangkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada ditingkat kabupaten (1 orang). Ketua bidang/perangkat pengelolaan perhutanan sosial di tingkat kabupaten (1 orang). Kepala/perangkat lembaga perhutanan sosial yang berada ditingkat nagari (2 orang). Instansi terkait seperti pertanian, peternakan, perikanan (2 orang). 	Kab. Sijunjung, Pasaman, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Mentawai	Deskriptif Kuantitatif dengan alat analisis statistik sederhana dan Skala Linkert	Kuesioner Panduan wawancara Tabulasi data Analisis data
2.	Melakukan studi <i>social network analysis</i> terkait hubungan antar	Hubungan antar pemangku kepentingan dalam	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi hubungan hirarki kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis 	Kuesioner (daring/luring)	33 orang dari: <ol style="list-style-type: none"> Kepala/perangkat bidang perhutanan sosial Provinsi 	Kab. Sijunjung, Pasaman, Pesisir	<i>software</i> Structural Equation Model-	Kuesioner Tabulasi data Analisis data Model SEM

	pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.	implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.	<p>masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinamika komunikasi kerja kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi. • Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kinerja sinergitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi. • Potensi konflik antar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi. • Bentuk/pola kerjasama antar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi. 		<p>Sumatera Barat (3 orang).</p> <p>2) Pimpinan/perangkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada ditingkat kabupaten (1 orang).</p> <p>3) Ketua bidang/perangkat pengelolaan perhutanan sosial di tingkat kabupaten (1 orang).</p> <p>4) Kepala/perangkat lembaga perhutanan sosial yang berada ditingkat nagari (2 orang).</p> <p>5) Instansi terkait seperti pertanian, peternakan, perikanan (2 orang).</p>	Selatan, Dharmasraya, Mentawai	Partial Least Square (SEM-PLS)	
3.	Rekomendasi terkait potensi konflik dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan hutan	Rekomendasi terkait potensi konflik dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan hutan di	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi untuk memperkuat sinergitas dan kerjasama antar lembaga pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. 	FGD (daring/luring)	<p>33 orang dari:</p> <p>1) Kepala/perangkat bidang perhutanan sosial Provinsi Sumatera Barat (3 orang).</p>	Kab. Sijunjung, Pasaman, Pesisir Selatan, Dharmasraya,	Deskriptif kualitatif dengan alat analisis sintesis dan interperatif.	Panduan FGD Tabulasi Resume Pernyataan penting dari FGD Analisis data dan informasi FGD

	di tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat tapak (nagari).	tingkat provinsi, kabupaten.			<ul style="list-style-type: none"> 2) Pimpinan/perangkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada ditingkat kabupaten (1 orang). 3) Ketua bidang/perangkat pengelolaan perhutanan sosial di tingkat kabupaten (1 orang). 4) Kepala/perangkat lembaga perhutanan sosial yang berada ditingkat nagari (2 orang). 5) Instansi terkait seperti pertanian, peternakan, perikanan (2 orang). 	Mentawai		
--	---	------------------------------	--	--	--	----------	--	--

NOTULEN RAPAT

Tanggal : 1 Maret 2023
Tempat : Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat
Narasumber : Pak Tito
Tim : Firman Hidayat, Muhamad Reza, Rizqha Burano

Jumlah PS di Sumatera Barat : 199 unit

Luas PS di Sumatera Barat 271.000 ha

10 UPTD pengelola PS → Pembagian berdasarkan DAS

1. Pasaman Raya (Pasaman Barat) → KPHL
2. 50 Kota (50 Kota) → KPHL
3. Agam Raya (Lubuk Basung – Palupuah) → KPHL
4. Bukit Barisan (Padang, Padang Pariaman, Pasaman, Solok, Sawah Lunto, Padang Panjang, Kab. Solok, Sijunjung) → KPHL
5. Sijunjung (sijunjung) → KPHL
6. Solok (Kab.solok) → KPHL
7. Ulu batang hari (Solok Selatan) → KPHL
8. Pesisir Selatan → KPHP
9. Dharmasraya → KPHP
10. Mentawai → KPHP

– PS → 12,4 juta
Pola indikator arah perhutanan sosial Sumbar (620 ribu)

– Pg 100
Pp 2021
No 9 tahun 2021 menteri lingkungan hidup

Pokja Percepatan PS → Kementrian

↓

Pokja Provinsi (Asisten 2 Bidang Ekonomi)

(Maret 2023 Penyuluhan)

↓

KPH ← Pokja Kabupaten (50 Kota, Pesisir Selatan → SK)

↓

Solok, Sijunjung → Proses

Kec. Tidak Ada



(PHN (Tingkat Nagari) / KPS

Ketua : Niniak Mamak

Hutan Nagari x Hutan Kemasyarakatan

Hutan dulu di Mentawai belum aktif

Komunikasi

- Setiap Pokja memiliki rencana kerja
- Adanya kolaborasi antar pokja
- Kepentingan politik (Pembentukan rapenda pilihan sosial inisiasi anggota dewan)
- PS Masuk PPSMD
- KPH Institusi langsung dari Provinsi
- Pokja terkait hubungan dengan pemerintah daerah di level kabupaten.

KPS berkewajiban :

1. Menyusun Rencana kerja didampingi oleh penyuluh kehutanan dari provinsi
2. PPPS jangka panjang 35 thn
PPPS jangka menengah 10 thn
RPPS jangka menengah 1 thn
3. RPPS disyahkan KPH yang 1 thn
4. KPH

Syarat kelompok Yang akan diberikan bantuan:

- Identifikasi kelembagaan
- SD yang mereka kelola valid
- Berdasarkan keinginan kelompok bukan kebutuhan pribadi

Permasalahan

- Kelompok PS yang sudah memiliki izin minim sdm
- Banyak Kelompok tidak aktif
- Ada kelompok sudah aktif lalu pecah
- Kelompok PS Yang sudah tua cenderung tidak maju ketimbang jika diketuai yang muda
- Konflik politik sosial
- 30 % anggaran untuk PS

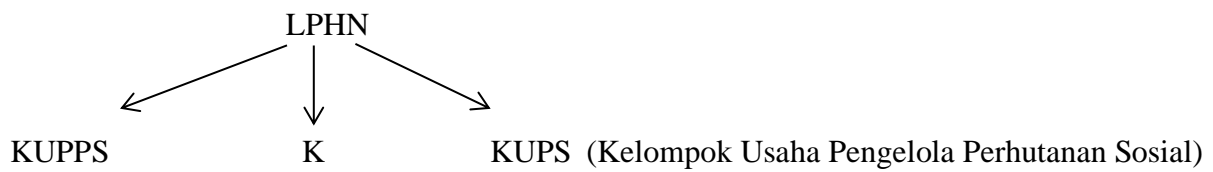
Tata kelola PS idealnya harus paham:

1. Kelola usaha
 2. Kelola lembaga
 3. Kelola kawasan
- Penting!!!

7 Pertemuan Kadis Maret 2023

Fokus Eko Masyarakat

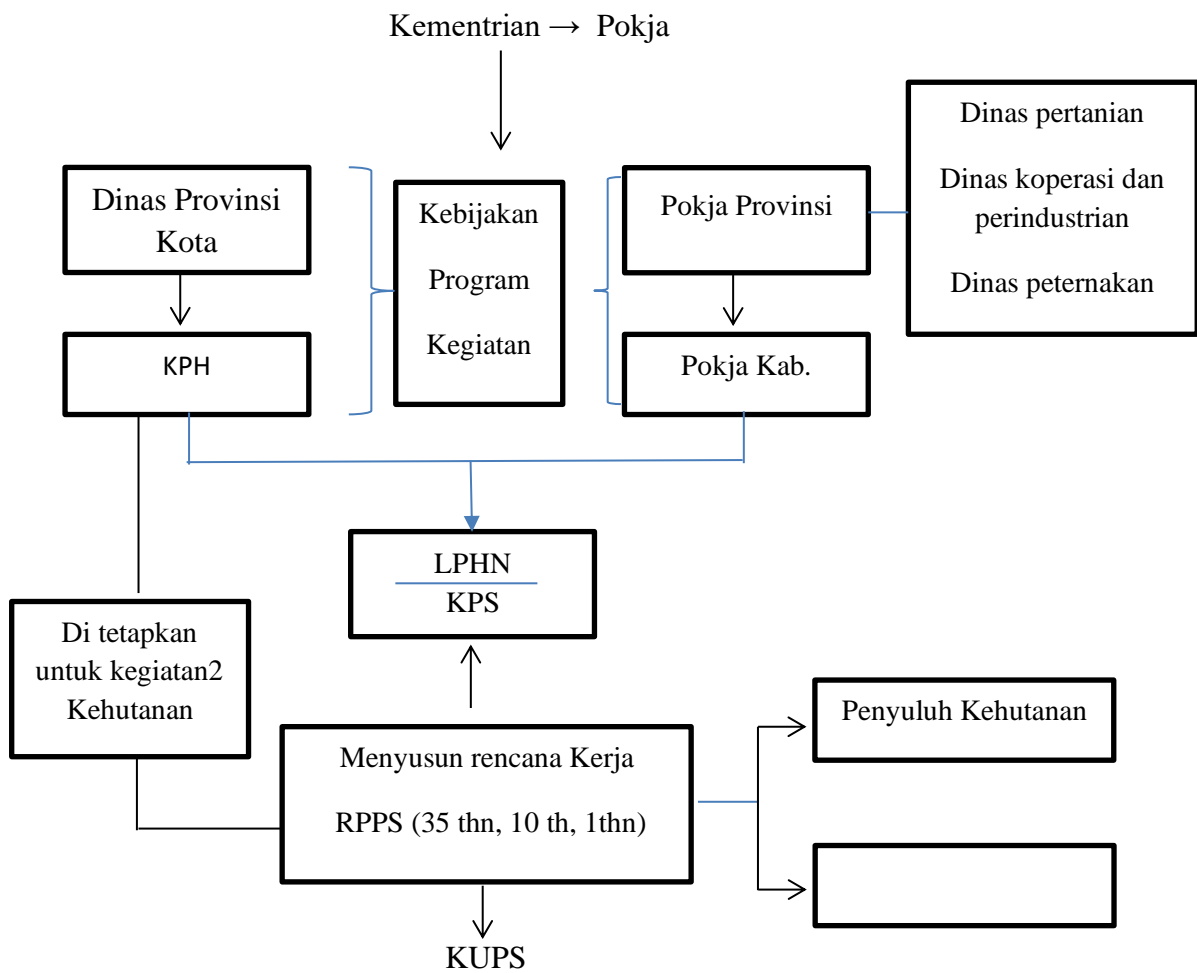
HKM X Hutan Desa



Usaha berdasarkan komoditi.

Kelas KUPS

1. Blue
2. Silver
3. Gold
4. Platinum → nyarai (Karena termasuk wisata mancanegara)





Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Pasir Kandang No. 4 Padang – Telp. 0751- 4851002. Fax. 0751-482274.

Email : lppm@umsb.ac.id & lppmumsb@gmail.com

LAPORAN
Deliverable 1 & 2

RISET KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT DI PERHUTANAN SOSIAL, SUMATERA BARAT

OLEH: TIM LPPM UM SUMATERA BARAT

PADANG, 31 MARET 2023

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, sehubungan dengan Kerjasama riset antara Word Resources Institute (WRI) Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UM. Sumatera Barat tentang PENGEMBANGAN EKONOMI DI PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT, maka dengan ini kami sampaikan bahwa penyusunan Laporan Deliverable 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan.

Laporan Deliverable 1 dan 2 berisikan daftar literatur yang dijadikan acuan dalam riset ini, daftar narasumber, daftar pertanyaan baik dalam bentuk list wawancara maupun kuisioner. Laporan ini juga berisikan hipotesa awal terkait gambaran pemangku kepentingan yang ada dan pengaruhnya terhadap pengelolaan perhutanan social di Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam menunjang penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan mencapai sasaran yang dimaksud.

Padang, Maret 2023
LPPM UM. Sumatera Barat

Tim Leader

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I	5
1.1. Daftar Literatur yang Dikaji Terkait Riset	5
1.2. Daftar Narasumber	7
1.2.1. Tabel Daftar Narasumber Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Sumatera Barat	8
1.3. Daftar Pertanyaan dan Kuesioner	9
BAB II.....	18

DAFTAR ISI

Gambar II.1. Hirarki Kelembagaan Pengelola Perhutanan Sosial di Sumatera Barat	18
--	----

BAB I. **DELIVERABLE 1**

Pada bagian ini akan disajikan beberapa instrument yang digunakan untuk mendapatkan data dan menjadi dasar dalam membuat hipotesa dalam penelitian “Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Sumatera Barat”. Adapun cakupan yang terdapat dalam deliverable 1 ini yaitu:

- a) Daftar literatur yang dikaji terkait Riset kelembagaan Perhutanan Sosial
- b) Daftar narasumber yang diwawancara
- c) Daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara

Ketiga point di atas dapat dijabarkan dan jelaskan satu persatu sebagaimana yang terlihat pada penjelasan berikut ini.

1.1. Daftar Literatur yang Dikaji Terkait Riset

Bahagian ini merupakan pondasi teoritis yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam menarik hipotesis atau jawaban sementara tentang “Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Sumatera Barat”. Daftar literatur ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jurnal ilmiah yang dipublikasikan oleh media yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutnan, Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam produk kebijakan ini juga dijelaskan tentang hakekat perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk **Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.**

Peraturan Pemerintah di atas dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam produk hukum ini dijelaskan setiap bentuk perhutanan sosial, yaitu:

- 1) **Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD** adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- 2) **Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm** adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

- 3) **Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR** adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- 4) **Hutan Adat** adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- 5) **Kemitraan Kehutanan** adalah pola kerjasama kegiatan pemanfaatan hutan oleh pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi dalam rangka Perhutanan Sosial.

Pada pasal 3 di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk Kemitraan Kehutanan dilaksanakan pada hutan konversi dan hutan lindung. Untuk pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan pengelolaannya dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi. Sedangkan hutan tanaman rakyat pengelolaannya dilaksanakan di hutan produksi. Pada pasal 7 dan pasal 8 dalam produk kebijakan yang sama menyatakan bahwa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat diberikan kepada perorangan, kelompok tani hutan dan koperasi dalam jangka waktu 35 tahun dan pat diperpanjang.

Untuk mempercepat akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial di tingkat provinsi dibentuk Pokja PPS yang ditetapkan oleh Gubernur. Pokja ini bertugas untuk: a) sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan pihak terkait; b) melakukan pencermatan terhadap PIAPS; c) Membantu fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan social, dan lebih lengkapnya dapat terlihat pada pasal 9 di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021. Anggota pokja PPS terdiri dari: a) UPT; b) unit pelaksana teknis terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c) Pemerintah Daerah provinsi; d) organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan; e) KPH; f) Pemerintah Daerah kabupaten/kota; g) Masyarakat sipil; h) pelaku usaha; i) kader konservasi; dan/atau j) relawan lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, pada tingkat kabupaten diamanahkan pada KPH yang ada dilingkungan perhutanan sosial.

Pengelolaan Hutan Desa diberikan kepada Lembaga Desa. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan kepada perorangan; kelompok tani; atau koperasi. Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dapat diberikan kepada Kelompok Tani Hutan; Gabungan Kelompok Tani Hutan; Koperasi Tani Hutan; atau professional kehutan yang bersifat perorangan.

Pengelola Kemitraan kehutanan diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra dalam bentuk Kelompok Tani Hutan atau Gabungan Kelompok Tani Hutan. Sedangkan Hutan Adat diberikan kewenangan pengelolaannya kepada MHA.

Mungkin baik kalau dijelaskan terlebih dahulu teori kelembagaan (karena dari bacaan Saya, yang banyak di sorot adalah lembaganya (bukan kelembagaan). Mungkin dengan menggunakan teori kelembagaan (misalnya pakai Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan). Sehingga nantinya saat interview tidak hanya tertuju pada lembaganya, namun unsur kelembagaannya juga.

Keseluruhan penjabaran yang termuat dalam kedua produk kebijakan di atas memperlihatkan ragam kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial. Adapun kelembagaan yang terlibat diatur dari tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa. Keberhasilan program perhutanan sosial sangat ditentukan oleh kinerja masing-masing lembag yang terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Horata *et al* (2018), kelembagaan masyarakat pengelola perhutanan sosial yang lemah menjadi salah satu penyebab tujuan dari program perhutanan sosial sulit tercapai. Temuan ini sejalan dengan yang didapatkan oleh Raharjo *et al* (2020) menyatakan bahwa kelembagaan petani masih belum mampu mandiri sehingga penguatan kelembagaan petani perlu menjadi prioritas. Kelembagaan lokal berperan penting dalam pengelolaan Hutan Nagari/Desa (Rubynski *et al*, 2018).

Kinerja Kelompok Tani Hutan yang baik menjadikan program dan kegiatan di perhutanan social dapat berjalan dengan baik (Istiqomah *et al*, 2021). Keberlanjutan pengelolaan perhutanan social dapakeberhasilat dipengaruhi oleh kinerja kelembagaan yang mengelola program dan kegiatan pada perhutanan social (Laksemi *et al*, 2019). Menurut Salaka *et al* (2020) kelembagaan dalam bentuk koperasi jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan kelembagaan di tingkat petani dalam melakukan pengelolaan Hutan Taman Rakyat. Kelembagaan gapoktan memiliki peran penting yang berfungsi mengatur aktivitas masyarakat secara individu ataupun kelompok dalam mengelola hutan kemasyarakatan (Larasati *et al*, 2021). Selain peran kelembagaan di tingkat petani, dibutuhkan peranan dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) untuk mengoptimalkan pencapaian program perhutanan sosial, namun demikian KPH memiliki keterbatasan ruang gerak dikarenakan adanya batas kewenangan dan keterbatasan pendanaan (Fitria *et al*, 2021).

Untuk kelembagaan ekonomi PS, salah satu ukurannya adalah keberhasilan capain levelnya seperti blue, silver, gold dan platinum. Sehingga perlu dicek juga, sudah dilevel berapa dan berapa banyak (per KPH). Oleh karena itu perlu ditambahkan data awal, komposisi level ini di Sumatera barat atau bahkan kalau bisa per KPH yang akan menjadi lokasi riset.

Commented [DA1]: Dapat dijelaskan juga pada bagian ini terkait teori yang menjelaskan pendelegasian pengelolaan hutan/SDA oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ribot dan Peluso (2001). Sehingga dapat melengkapi regulasi/kebijakan yang juga sudah disebutkan.

Commented [DA2]: Menambahkan apa yang disampaikan disini, perlu juga mengidentifikasi program-program apa yang sudah dicanangkan untuk menunjang kegiatan ini dan apa hasilnya.

Hasil ini dapat dijadikan semacam indikasi terkait efektivitas kelembagaan PS di Sumbar selama ini, dan mendiagnosa permasalahan secara awal yang nantinya dapat ditelusuri lebih lanjut pada tahapan2 riset selanjutnya.

1.2. Daftar Narasumber

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode ini menggunakan pendekatan penentuan individu yang akan dijadikan responden dengan cara sengaja melalui pertimbangan khusus. Pertimbangannya yaitu bahwasannya individu yang digunakan sebagai responden adalah pelaku utama dalam kegiatan perhutanan sosial di Sumatera Barat. Melalui tabel berikut ini dapat terlihat sebaran dan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk Narasumber apakah hanya KPH dan Dinas? Justru banyak kelembagaan PS yang berkembang karena dukungan modal sosial yang kuat dilevel tapak seperti peran anak-anak muda yang inovatif (HKm Solok Rajo, HN Gamaran Lubuk Alung, HKM Indudur, HN Taram dan lainnya) yang muncul karena modal sosial kuat dimasyarakat. Oleh karena itu penting juga menambahkan respondennya adalah KUPS/Pengurus HN/HKm. Agar nantinya bisa tepat mekihat dan menganalisisnya. Karena banyak KPHnya yang tidak berjalan baik, tapi masyarakatnya yang justru mengembangkan kelembagaan ekonominya. Idelalnya adalah kolaborasi KPS/KUPS dengan KPH/Dinas Kehutanan. Kolaborasi ini yang kemudian berhasil.

Commented [DA3]: Hal ini juga berkaitan dengan proses inklusi pengelolaan hutan nagari tidak hanya oleh kaum lelaki tetapi juga dengan melibatkan kaum perempuan/pemuda dalam prosesnya. Sehingga laporan akhir nanti juga dapat mencakup persepsi kelompok ini dan bagaimana mengembangkan kelembagaan menjadi lebih baik.

1.2.1 Tabel Daftar Narasumber Riset Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Perhutanan Sosial, Sumatera Barat

No	Tingkatan Wilayah Kerja	Nama Responden	Tugas/Fungsi di Perhutanan Sosial	Nomor HP/WA
1.	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Kusworo Mulyono	Kepala Bidang Perhutanan Sosail	08116650871
		Tito Trio Putra	Kasi Bidang Perhutanan Sosial	085364967100
			Staf pengelola perhutanan sosial	
2.	KPHL Tingkat Kabupaten: a. KPHL Bukit Barisan (Kab. Pdg. Pariaman)		Kepala KPHL	
		Zeptin Alex Vildiro, M.M	Bidang/ Seksi Perhutanan sosial KPHL Bukit Barisan	
			Pengurus KPHN	
			Pengurus KUPS	
			Pengurus KTH Nyarai (KUPS Ekowisata dan KUPS BUNdo Gamaran)	
			Pengurus KTH Nyarai	
			Perangkat pemerintah Nagari yang membidangi kegiatan perhutanan social	
b. KPHL Kab. Solok	Hari Kurniawan, S.Hut	Kepala KPHL		085374441631
		Bidang/ Seksi		

			Perhutanan sosial KPHL Kab. Solok.	
			Pengurus KPHN	
	Febri Hidayat		Pengurus KUPS Kopi Solok Rajo	085272977477
	Muhammad Diki		Pengurus KUPS Kopi Solok Rajo	082387879169
			Pengurus KTH	
			Pengurus KTH	
			Perangkat pemerintah Nagari yang membidangi kegiatan perhutanan social	
c.	KPHL Pasaman Raya (Kab. Pasaman Barat)	Afrizal N	Kepala KPHL	08127633525
		Yusko Pili	Bidang/ Seksi Perhutanan sosial KPHL	081267959576
		Sofiadi	Pengurus LPHN	081374237141
		Sofiadi	Pengurus KUPS	081374237141
		Syamsudin	Pengurus KTH Lembah Madu Sungai Kalam	082286378035
		Edi Budiman	Pengurus KTH Lembah Madu Sungai Kalam	082229197075
		Rendi	Pengurus KTH Lembah Madu Sungai Kalam	085271425425
		Sudaidi	Perangkat pemerintah Nagari yang membidangi kegiatan perhutanan social Untuk Pasaman disarankan di LPHN Limo Koto dan Musus Saiyo	085364622069
d.	KPHL Pasaman Raya (Kab. Pasaman)		Kepala KPHL	
			Bidang/ Seksi Perhutanan sosial KPHL	
			Pengurus KPHN	
			Pengurus KUPS	
			Pengurus KTH	
			Pengurus KTH	
		Perangkat pemerintah Nagari yang membidangi kegiatan perhutanan social		
e.	KPHP Pesisir Selatan	Urip Azhari, M.Si	Kepala KPHP	081288439093
			Bidang/ Seksi Perhutanan sosial KPHL	
			Pengurus KPHN	
			Pengurus KUPS	
			Pengurus KTH	
			Pengurus KTH	
		Perangkat pemerintah		

			Nagari yang membidangi kegiatan perhutanan social	

Sumber : Hasil Survey, 2023

1.3. Daftar Pertanyaan dan Kuesioner

Penelitian ini memadukan teknik pengumpulan data diantaranya adalah menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Adapun daftar pertanyaan untuk wawancara data terlihat sebagai berikut dan dilanjutkan dengan kuesioner.

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA/DAFTAR PERTANYAAN

- 1) Apasaja kelembagaan perhutanan sosial yang terdapat di Sumatera Barat, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/nagari ?
- 2) Apasaja tugas dan fungsi untuk setiap kelembagaan tersebut ?
- 3) Apakah kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya ?
- 4) Apasaja permasalahan yang dihadapi setiap kelembagaan PPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya ?
- 5) Apakah ada kelembagaan PPS tingkat desa/nagari yang telah memperlihatkan kesuksesan sesuai dengan harapan ?
- 6) Apasajakah bentuk support pemerintah dalam mengoptimalkan peran kelembagaan PPS terutama di tingkat desa/nagari ?
- 7) Bagaimana kondisi sinergi antar kelembagaan PPS di Sumatera Barat ?
- 8) Apasaja bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan kelembagaan PPS di Sumatera Barat ?
- 8)9) Bagaimana keterlibatan kaum pemuda dan perempuan dalam kelembagaan pengelolaan PS di Sumbar? Apakah kelompok ini telah berperan aktif atau belum optimal peran mereka? Jika belum, apakah terdapat upaya untuk mengatasi hal tersebut?

KUESIONER

KETERANGAN PENGISIAN KUESIONER

Kuesioner ini dikonstruksi menggunakan dua model yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Untuk kuesioner tertutup disediakan pilihan jawaban atau tanggapan yang dapat Bapak/Ibuk pilih sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan kuesioner terbuka, jawaban atau tanggapan diberikan oleh responden diberikan dalam bentuk narasi pengetahuan dan pengalamannya.

Adapun teknis pengisian kuesioner yaitu:

- Responden diminta untuk memberikan tanda centang (√) untuk setiap pilihan jawaban atau tanggapan yang telah tersedia dalam kuesioner.
- Responden diminta untuk menulis narasi jawaban atau tanggapan pada pertanyaan yang bersifat terbuka.
- Dalam pelaksanaannya setiap responden akan didampingi oleh tenaga teknis lapangan yang disediakan oleh tim kami.

PROFIL RESPONDEN

Nama Lengkap	:	
Umur	:	Thn
Jenis kelamin	:	Laki-laki/perempuan
Pekerjaan	:	PNS () Swasta () Petani () Lainnya.....
Instansi	:	
Alamat domisili	:	
Telepon/HP/WA	:	

DAFTAR PERTANYAAN/PERNYATAAN

I. Memetakan Persepsi Stakeholder Terkait Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat dan Isu-Isu Terkait

Bapak/Ibuk diminta untuk memberikan tanggapan atau persepsinya melalui pilihan yang telah disediakan tentang pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Adapun pilihan jawaban yang disediakan yaitu: **SS (Sangat Setuju)**, **S (Setuju)**, **CS (Cukup Setuju)**, **TS (Tidak Setuju)**, **STS (Sangat Tidak Setuju)**.

Tanggapan yang diberikan mesti disesuaikan dengan skema perhutanan social yang ditetapkan pemerintah, yaitu:

- Hutan Nagari/Hutan Desa
- Hutan Kemasyarakatan
- Hutan Tanaman Rakyat
- Hutan Adat
- Kemitraan Kehutanan

Commented [DA4]: Mohon dapat juga menyertakan pernyataan yang mencakup keterlibatan pemuda/perempuan dalam pengelolaan tipe2 PS

A. Hutan Nagari/Hutan Desa

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
Pernyataan (+)						
1.	Pengelolaan hutan nagari mesti berbasis masyarakat.					
2.	Masyarakat memiliki kewenangan dalam mengelola hutan nagari.					
3.	Sumberdaya yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mengelola hutan nagari					
4.	Untuk mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan nagari dibutuhkan kelembagaan dari tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
5.	Kelembagaan pengelolaan hutan nagari yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah terbentuk.					
6.	Kelembagaan pengelolaan hutan nagari yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah dilegalkan.					

7.	SDM pengelola kelembagaan hutan nagari tersedia lengkap dan mumpuni.					
8.	Tersedianya anggaran dana untuk menjalankan kelembagaan dalam mengelola hutan nagari.					
9.	Lengkapnya sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan nagari					
10.	Adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan nagari/desa.					
11.	Kinerja kelembagaan pengelolaan hutan nagari telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
12.	Masyarakat telah merasakan manfaat terhadap keberagaan kelembagaan yang mengelola hutan nagari/desa.					
Pernyataan (-)		STS	TS	CS	S	SS
1.	Tidak selalu hutan nagari dikelola oleh masyarakat.					
2.	Masyarakat tidak diwajibkan mengelola hutan nagari.					
3.	Masyarakat tidak memiliki sumberdaya dalam mengelola hutan nagari					
4.	Pemerintah dapat langsung mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan nagari/hutan desa.					
5.	Belum ada kelembagaan pengelolaan hutan nagari yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
6.	Belum legalnya kelembagaan pengelolaan hutan nagari yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
7.	Belum lengkapnya SDM pengelola kelembagaan hutan nagari.					
8.	Anggaran dana terbatas dalam menjalankan kelembagaan untuk mengelola hutan nagari.					
9.	Belum tersedia sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan nagari.					
10.	Masih minim kegiatan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan nagari/desa.					
11.	Belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan hutan nagari.					
12.	Belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan yang mengelola hutan nagari/desa.					

Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.

a) Apasaja dukungan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan nagari?	:	
b) Apasaja hambatan yang dihadapi dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan nagari ?	:	

B.HUTAN KEMASYARAKATAN

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
Pernyataan (+)						
1.	Pengelolaan hutan kemasyarakatan mesti berbasis masyarakat.					
2.	Masyarakat memiliki kewenangan dalam mengelola hutan kemasyarakatan.					
3.	Sumberdaya yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk mengelola hutan kemasyarakatan.					
4.	Untuk mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan dibutuhkan kelembagaan dari tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
5.	Kelembagaan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah terbentuk.					
6.	Kelembagaan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa telah dilegalkan.					
7.	SDM pengelola kelembagaan hutan kemasyarakatan tersedia lengkap dan mumpuni.					
8.	Tersedianya anggaran dana untuk menjalankan kelembagaan dalam mengelola hutan kemasyarakatan.					
9.	Lengkapnya sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan kemasyarakatan					
10.	Adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan kemasyarakatan.					
11.	Kinerja kelembagaan pengelolaan hutan kemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
12.	Masyarakat telah merasakan manfaat terhadap keberagaan kelembagaan yang mengelola hutan					

	kemasyaratan.	STS	TS	CS	S	SS
<i>Pernyataan (-)</i>						
1.	Tidak selalu hutan kemasyaratan dikelola oleh masyarakat.					
2.	Masyarakat tidak diwajibkan mengelola hutan kemasyaratan.					
3.	Masyarakat tidak memiliki sumberdaya dalam mengelola hutan kemasyaratan.					
4.	Pemerintah dapat langsung mengorganisir kegiatan pengelolaan hutan kemasyaratan.					
5.	Belum ada kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
6.	Belum legalnya kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan yang berada di tingkat pusat, provinsi, kab/kota dan nagari/desa.					
7.	Belum lengkapnya SDM pengelola kelembagaan hutan kemasyaratan.					
8.	Anggaran dana terbatas dalam menjalankan kelembagaan untuk mengelola hutan kemasyaratan.					
9.	Belum tersedia sarana dan prasarana untuk kelembagaan pengelola hutan kemasyaratan.					
10.	Masih minim kegiatan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan.					
11.	Belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan hutan nagari.					
12.	Belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan yang mengelola hutan kemasyaratan.					

<i>Isu strategis (dukungan dan hambatan) dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja dukungan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan? 	:
<ul style="list-style-type: none"> • Apasaja hambatan yang dihadapi dalam mengoperasikan kelembagaan pengelolaan hutan kemasyaratan ? 	:

II. Social Network Analysis Terkait Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Bapak/Ibuk diminta untuk memberikan tanggapan atau persepsinya melalui pilihan yang telah disediakan tentang pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.

A. Kondisi hubungan hirarki kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

Untuk jawaban pada poin ini Bapak/ Ibu diminta mengisi matriks pada lampiran sesuai Skema Kelembagaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

1. Skema Hutan Desa (untuk HD/HN tidak ada KTH. Tapi kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Perdes/Pernag) biasanya kelembagaannya berupa LPHN (KPS) dan kemudian membentuk KUPS-KUPS. Untuk KTH untu HKm

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

2. Skema Hutan Kemasyarakatan (kelembagaannya KTH)



B. Dinamika komunikasi kerja kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban	
		Iya	Tidak
1.	Pola komunikasi antar Lembaga adalah satu arah		
2.	Terjadinya komunikasi dua arah atau timbal balik antar Lembaga		
3.	Terjadinya pola komunikasi multi arah antar lembaga		
4.	Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah		
5.	Lembaga pada hirarki yang lebih rendah tidak bisa mengambil kebijakan tanpa adanya persetujuan dari Lembaga pada hirarki yang lebih tinggi		
6.	Terdapat pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar lembaga		
7.	Adanya komunikasi yang terbuka dan komunikatif antar anggota dalam satu lembaga		
8.	Setiap anggota kelompok memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide, kritikan dan saran		

9.	Komunikasi dilakukan secara tertulis dan bersifat formal		
10.	Komunikasi dapat dilakukan secara lisan		

C. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kinerja sinergitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban		
		Ada	Cukup Ada	Tidak Ada
A. Admistrasi dan Kelembagaan				
1.	Tersedianya lembaga pengelolaan perhutanan social memiliki susunan pengurus disetiap tingkatan wilayah administrative dan memiliki pembagian tugas yang jelas			
2.	Lembaga pengelolaan perhutanan social memiliki catatan administrasi yaitu buku kas, buku daftar anggota, buku tamu dan buku inventaris			
3.	Lembaga pengelolaan perhutanan social memiliki sertifikat pengesahan dari Lembaga resmi			
4.	Adanya kelengkapan sarana dan prasarana administrasi dan kelembagaan pengelolaan perhutanan sosial			
5.	Adanya ketersediaan anggaran dana untuk operasional kelembagaan pengelolaan perhutanan sosial			
6.	Terjalannya komunikasi administrasi dan birokrasi antar kelembagaan perhutanan sosial			
B. Aktivitas Kelompok				
1.	Setiap kelembagaan yang berada pada masing-masing tingkatan Memiliki rencana kerja yang sudah disahkan			
2.	SDM yang berada dalam kelembagaan pengelolaan perhutanan social memahami dan melaksanakan rencana kerja			
3.	SDM kelembagaan pengelola perhutanan social telah merealisasikan kegiatan usaha (Budidaya tanaman obat, Budidaya tanaman hias, Budidaya jamur, Budidaya lebah, Penangkaran satwa liar, Rehabilitasi satwa, Budidaya hijauan makanan ternak) yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.			
4.	Anggota Lembaga dan masyarakat mendapatkan manfaat dari areal perhutanan sosial yang dikelola			
5.	Lembaga pengelola perhutanan social melakukan pemanfaatan jasa lingkungan seperti Pemanfaatan jasa aliran air, Pemanfaatan air, Wisata alam, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penyerapan atau penyimpanan karbon.			
6.	Lembaga pengelola perhutanan social memiliki koperasi dan sudah bermitra			
7.	Lembaga pengelola perhutanan social telah melakukan aktivitas pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu			
8.	Melakukan pertemuan rutin dalam anggota Lembaga dan juga antar lembaga Tersedianya alokasi anggaran untuk aktivitas kelompok pengelola perhutanan sosial Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan rencana kerja kelompok			
C. Pelaporan				
1.	Lembaga pengelola perhutanan social menyampaikan laporan tepat waktu dan sesuai dengan kelengkapan yang ditentukan			
2.	Lembaga pengelolaan perhutanan social memiliki semua dokumentasi kegiatan			
3.	Telah memiliki dan menerapkan system pelaporan untuk setiap kelembagaan perhutanan sosial			
4.	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan			

D. Potensi konflik antar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

Lembaga di Tingkat Desa	:	
<ul style="list-style-type: none"> Apa saja konflik yang dialami oleh pengelola Lembaga pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? Siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? 		

<ul style="list-style-type: none"> • Kapan konflik terjadi dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? • Mengapa konflik dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? • Dimana terjadinya konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? • Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat nagari/ desa? 	
<p>Lembaga di Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja konflik yang dialami oleh pengelola Lembaga pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Kapan konflik terjadi dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Mengapa konflik dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Dimana terjadinya konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? • Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat kecamatan? 	
<p>Lembaga di Tingkat Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja konflik yang dialami oleh pengelola Lembaga pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? • Siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? • Kapan konflik terjadi dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? • Mengapa konflik dapat terjadi dalam 	

<p>menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimana terjadinya konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? • Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Kabupaten? 		
Lembaga di Tingkat Provinsi	:	
<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja konflik yang dialami oleh pengelola Lembaga pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Kapan konflik terjadi dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Mengapa konflik dapat terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Dimana terjadinya konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		
<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan perhutanan social di tingkat Provinsi? 		

E. Bentuk/pola kerjasama antar kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di tingkat nagari, kabupaten dan provinsi.

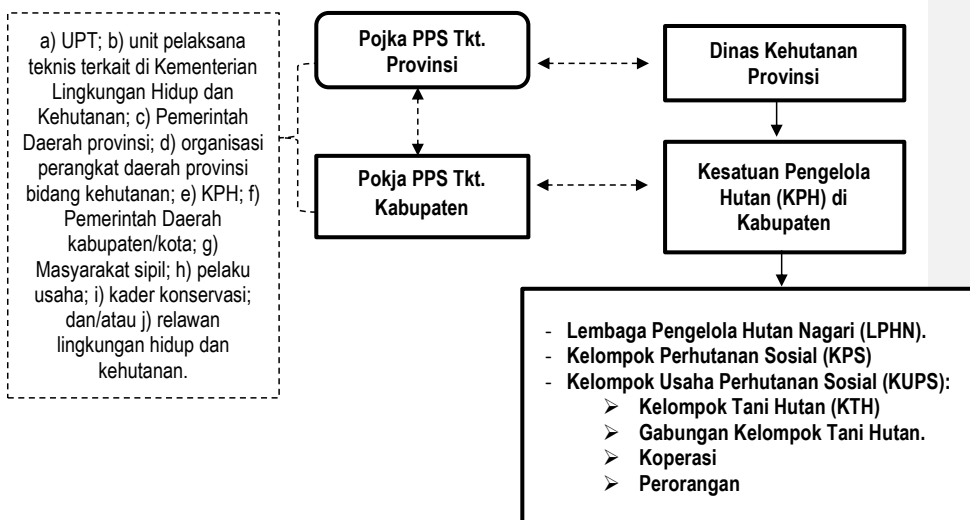
No	DAFTAR PERNYATAAN	Pilihan Jawaban	
		Ada	Tidak Ada
1.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat nagari mendapatkan bantuan modal dari pengelola perhutanan social di tingkat kabupaten/ kota		
2.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat kabupaten/kota mendapatkan bantuan modal dari pengelola perhutanan social di tingkat provinsi		
3.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat Provinsi mendapatkan bantuan modal dari pengelola perhutanan social di tingkat nasional		
4.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat nagari mendapatkan pembinaan manajemen usaha dan bantuan sarana dari pengelola perhutanan social di tingkat kabupaten/ kota		
5.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat kabupaten/kota mendapatkan pembinaan		

	manajemen usaha dan bantuan sarana dari pengelola perhutanan social di tingkat provinsi		
6.	Lembaga pengelola perhutanan social di tingkat Provinsi mendapatkan pembinaan manajemen usaha dan bantuan sarana dari pengelola perhutanan social di tingkat nasional		
7.	Lembaga pengelolan perhutanan di tingkat nagari/desa memiliki mitra		
8.	Lembaga pengelolan perhutanan di tingkat kabupaten/ kota memiliki mitra		
9.	Lembaga pengelolan perhutanan di tingkat provinsi memiliki mitra		

BAB II. DELIVERABLE 2

Laporan hipotesa awal /*preliminary analysis* terkait gambaran pemangku kepentingan yang ada dan pengaruhnya terhadap implementasi/pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat.

Merujuk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat dapat terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar II.1. Hirarki Kelembagaan Pengelola Perhutanan Sosial di Sumatera Barat

Merujuk pada gambar di atas, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang membuat Pokja Pengelola Perhutanan Sosial (PPS). Dimana Pokja PPS sebelumnya sudah habis masa tugasnya. Sedangkan Pokja PPS tingkat Kabupaten belum ada satupun yang terbentuk. Mestinya di Provinsi Sumatera Barat memiliki \pm 10 Pokja PPS di tingkat kabupaten yang tersebar di 10 KPHL. Sedangkan kelembagaan PPS di tingkat desa/nagari yang telah terbentuk terdapat di skem perhutanan social dalam bentuk Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, sedangkan Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat belum banyak Lembaga pengelolanya yang terbentuk.

Dilihat dari hirarki kelembagaan PPS pada Gambar 1, terdapat beberapa kelembagaan yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat. Adapun kelembagaan yang dimaksud yaitu:

- a) Pokja PPS Provinsi Sumatera Barat. Kelembagaan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial yaitu melakukan fasilitasi untuk aktivitas pengelolaan perhutanan sosial. Unsur utama yang diembankan pada Pokja PPS Provinsi Sumatera Barat yaitu fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial.
- b) Lembaga Pengelola setiap skem perhutanan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat). Untuk setiap skem pengelolanya berbeda-beda bentuknya (lihat Gambar 1). Kelembagaan ini berada ditingkat desa/nagari yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan perhutanan sosial.

Kedua kelompok kelembagaan di atas memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya pengelolaan perhutanan sosial dengan baik. Pada saat kedua kelompok kelembagaan tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di lokasi perhutanan sosial yang telah dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat.

Commented [DA5]: Mungkin dapat juga disertakan analisis awal terkait kelembagaan yang ada sekarang ini. Tidak hanya diatas kertas tetapi juga sesuai dengan kondisi riil yang ada. Lalu dapat dielaborasi hal-hal yang mungkin menjadi tantangan selama ini dalam proses kelembagaan PS di Sumbar selama ini sehingga berdampak pada implementasi PS di SUMbar itu sendiri.

Saya rasa ini penting untuk diidentifikasi sehingga dapat dikonfirmasi lagi pada tahapan riset selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitira, dkk. 2021. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal analisis kebijakan kehutanan*, volume 18, nomor 2
- Horota, dkk. 2018. Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Kabupaten Manokwari. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, Volume 4, Nomor 2
- Istiqomah, dkk. 2021. Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial Di Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayutangi. *Jurnal Sylva Scientiae*, Volume 4, Nomor 3
- Laksemi, dkk. 2019. Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, Volume 7, Nomor 2
- Larasati, dkk. 2021. Peran Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*, Volume 4, nomor 1
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Raharjo, dkk. 2020. Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 11, Nomor 2
- Rubynski, dkk. 2018. Peran Kelembagaan Nagari Dalam Pengelolaan Hutan Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok The Role Of Nagari Institutions In Forest Management In Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, Volume 1, Nomor 2
- Salaka, dkk. 2019. Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Di Tingkat Lokalefektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Di Tingkat Lokal. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Volume 17, Nomor 1